

**KAJIAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN NGAWI**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister**  
Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Pembangunan



**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
SURAKARTA  
2012**

i

**KAJIAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN NGAWI**

**Disusun oleh :  
HANGGA AGUNG OTTO FANDIAN  
S 4210026**

Teah disetujui oleh Pembimbing

Pembimbing I



**Prof. Dr. Tulus Haryono, M.Ek**  
NIP. 19550801 198103 1 006

Pembimbing II



**Drs. Akhmad Daerobi, M.S**  
NIP. 19570804 198601 1 002

Ketua Program Studi  
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan



**Dr. A. M. Susilo, M.S.**  
NIP. 19590328 198803 1 001

**KAJIAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN NGAWI**

Disusun Oleh :  
**HANGGA AGUNG OTTO FANDIAN**

**S 4210026**

Telah Disetujui oleh Tim Penguji

Pada Tanggal : 15 Mei 2012

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. A.M. Susilo, M.S.	
Pembimbing Utama	Prof. Dr. Tulus Haryono, M.Ek	
Pembimbing Pendamping	Drs. Akhmad Daerobi, M.S.	

Mengetahui  
Direktur PPs UNS



  
**Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.**  
NIP. 19610717 198601 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Ekonomi dan Studi  
Pembangunan



**Dr. A.M. Susilo, M.S.**  
NIP. 19590328 198803 1 001

**HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANGGA AGUNG OTTO FANDIAN

NIM : S 4210026

Program Studi : Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Pembangunan

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dan hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya

Surakarta, Maret 2012

Tanda,



HANGGA AGUNG OTTO FANDIAN

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "**Kajian Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi**". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi, untuk mengetahui dan permasalahan dan kendala yang dihadapi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan usahanya, dan untuk mengidentifikasi seberapa jauh komitmen pemerintah daerah dalam memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan populasinya yaitu Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi serta pelaku koperasi dan UMKM. Dalam proses pengambilan data penulis menggunakan pendekatan dengan metode survey lapangan terhadap responden yang dipilih secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi dan UMKM mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa penghargaan yang diraih serta jumlah koperasi dan UMKM yang semakin banyak. Perkembangan juga disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Hambatan yang dialami adalah terkait dengan keterbatasan modal, yterbatasnya akses pemasaran serta pola pikir yang masih tradisional dalam menjalankan usahanya. Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat mengatasi hambatan – hambatan yang dialami oleh pelaku koperasi dan UMKM tersebut.

Kata kunci : Pemberdayaan, Perkembangan, Koperasi dan UMKM, Modal dan Pemasaran

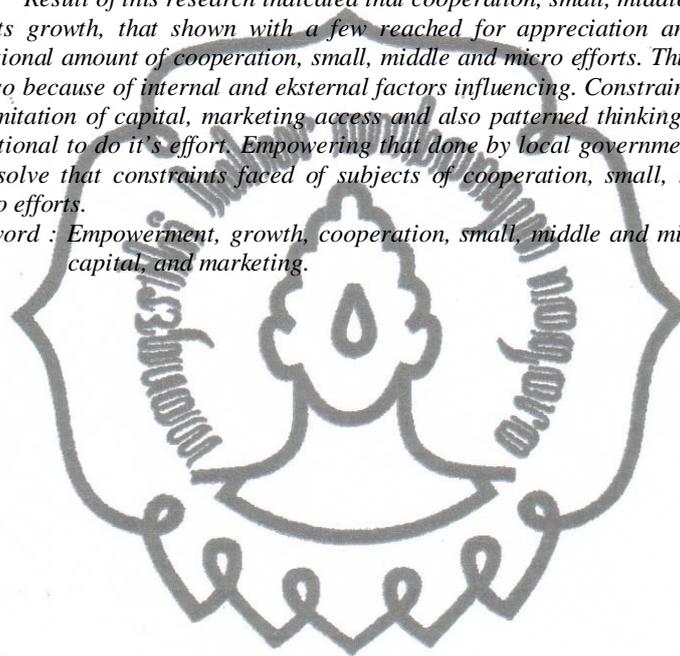
## **ABSTRACT**

*This research entitled “Study Empowering of cooperation, small, middle and micro efforts and industrial official Ngawi Regency” aim to know growth of cooperation, small, middle and micro efforts, to know constraint and problems faced of cooperation, small, middle and micro efforts in Ngawi Regency to do it’s effort and to identify how far local government commitment to empowering cooperation, small, middle and micro efforts in Ngawi Regency.*

*This is a descriptive qualitative research with population of cooperation, small, middle and micro efforts and industrial official Ngawi Regency and also subjects of cooperation, small, middle and micro efforts. Technique of data collecting use interview, observation, documentation and survey method approach to respondent who selected by purposive sampling.*

*Result of this research indicated that cooperation, small, middle and micro efforts growth, that shown with a few reached for appreciation and also the additional amount of cooperation, small, middle and micro efforts. This condition is also because of internal and eksternal factors influencing. Constraint is related to limitation of capital, marketing access and also patterned thinking which still traditional to do it’s effort. Empowering that done by local government expected can solve that constraints faced of subjects of cooperation, small, middle and micro efforts.*

*Keyword : Empowerment, growth, cooperation, small, middle and micro efforts, capital, and marketing.*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta Ilmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Atas limpahan rahmat dan ijin-Nya, akhirnya peneliti berhasil menyelesaikan penelitian tesis ini meskipun masih banyak kekurangan di dalamnya.

Tentunya selama penyusunan penelitian tesis ini, maupun selama peneliti menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, tidak sedikit bantuan yang peneliti terima baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini ijinlah peneliti menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada;

1. Bapak Dr. A. M. Susilo, M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan yang banyak memberikan dorongan dan kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan pengetahuan mengenai ekonomi pembangunan.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Haryono, M.Ek selaku pembimbing I penelitian tesis yang memberikan bimbingan, arahan dan kemerdekaan berpikir bagi peneliti dalam proses penyusunan hingga penyelesaian penelitian tesis ini.
3. Bapak Drs. Akhmad Daerobi, MS. selaku pembimbing II penelitian tesis yang memberikan bimbingan, arahan dan kemerdekaan berpikir bagi peneliti dalam proses penyusunan hingga penyelesaian penelitian tesis ini.
4. Istriku tercinta Reny Novia Dewi dan anakku Muhammad Agha Samudra Wiratama yang selalu memberikan semangat, semangat dan semangat.

5. Bapak Mohammad Affandi dan Mama Yuli Rusdiana yang telah mendidikku untuk dapat menjadi insan yang bertaqwa dan berguna dalam kehidupan ini.
6. Semua pihak yang belum penulis sebutkan dalam kesempatan ini, terima kasih atas segala bantuannya.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi siapapun pembacanya dan menjadi amal baik bagi peneliti, ayah ibu peneliti dan amal baik setiap orang yang membantu penyusunan tesis ini. Amiin.

*Wassalamuallaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pemberdayaan .....	9
B. Koperasi .....	13
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	16
D. Penelitian Sebelumnya .....	20
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Populasi dan Sampel .....	23
C. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	26
D. Teknik Pengukuran Keabsahan Data .....	28
E. Kerangka Pemikiran .....	29

**BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Ngawi ..... 31

B. Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi..... 34

C. Hambatan Pelaku Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menjalankan Usahanya ..... 57

D. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah ..... 63

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 79

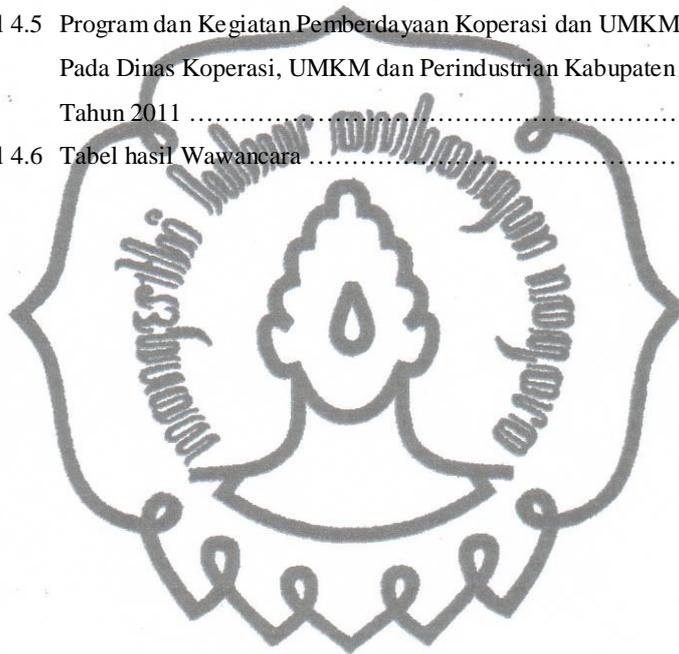
B. Saran ..... 82

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 83



**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Jenis Koperasi di Kabupaten Ngawi (Tahun 2006 – 2011) .....	33
Tabel 4.2	Perkembangan Koperasi Primer di Kabupaten Ngawi (Tahun 2006 – 2011) .....	38
Tabel 4.3	Jumlah Pengusaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi Menurut Sektor Usaha tahun 2006 – 2010 .....	41
Tabel 4.4	Daftar Profil Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi tahun 2011 .....	44
Tabel 4.5	Program dan Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi Tahun 2011 .....	65
Tabel 4.6	Tabel hasil Wawancara .....	71



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran ..... 30



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Badai krisis ekonomi yang dialami oleh Bangsa Indonesia pada tahun 1997 sangat memukul dan melumpuhkan perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir sebagian besar kelompok industri mengalami penurunan dalam jumlah produksi dan tenaga kerja. Menurut Suryahadi, dkk dalam Gunadi Brata (2003) pada masa krisis tingkat pengangguran mengalami kenaikan dari 4,9 % di tahun 1996 menjadi 6,1 % pada tahun 2000. Berdasarkan data PDRB ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) krisis ekonomi telah menyebabkan propinsi-propinsi di Jawa mengalami kontraksi ekonomi yang lebih besar ketimbang daerah-daerah lain di Indonesia. Lima propinsi di Jawa seluruhnya adalah lima besar propinsi di Indonesia yang mengalami kemerosotan ekonomi terparah. Pada tahun 1998, saat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi terparah, hanya Papua saja yang pertumbuhan ekonominya masih positif sedangkan propinsi-propinsi lainnya mengalami kontraksi. Pada tahun tersebut, seluruh propinsi di pulau Jawa mengalami kontraksi ekonomi yang jauh lebih parah daripada propinsi-propinsi lainnya. Ciri industri yang relatif lebih tahan terhadap dampak negatif krisis adalah industri yang pada umumnya memakai bahan baku lokal (domestik), salah satunya adalah usaha kecil (Sutrisno:2010).

Sebelum krisis ekonomi keberadaan usaha kecil dan menengah kurang mendapat perhatian, tetapi pada saat krisis ekonomi justru sektor usaha ini tetap

bertahan bahkan dengan jumlah yang meningkat pesat. Kuatnya daya tahan usaha kecil dan menengah ini karena didukung oleh struktur permodalan yang lebih banyak tergantung pada dana sendiri atau 73% dari total permodalan, penggunaan dana sendiri ini juga tidak terlepas karena kurang keberpihakan sektor perbankan terhadap usaha kecil dan menengah (Adiningsih:2003).

Usaha kecil dan menengah di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga (Brata:2003). Dalam hal penyerapan tenaga kerja, meningkat dari sekitar 12 juta pada tahun 1980 menjadi 74,5 juta pada tahun 2001 (Adiningsih:2003) dan pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 79,06 juta pekerja ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)). Begitu juga sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang diciptakan UKM tahun 2003 mencapai Rp. 1.013,5 triliun atau 56,7 % dari PDB dan pertumbuhan sumbangan terhadap PDB ternyata lebih tinggi daripada usaha besar (Pikiran Rakyat:2006). Kemudian perekonomian Indonesia tahun 2004 yang diciptakan usaha kecil dan menengah berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 1.135,8 triliun ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)).

Perkembangan sektor usaha kecil dan menengah yang demikian penting menyiratkan bahwa terdapat potensi besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh seperti yang terjadi di Korea Selatan dan Taiwan (Wijono:2005). Di sisi lain sebagai upaya menghadapi persiapan berakhirnya program kerjasama dengan IMF pada akhir 2003, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan program kebijakan ekonomi terpadu pada 15 September 2003 yang

mencakup kebijakan fiskal, keuangan dan sektor riil serta kebijakan moneter. Kebijakan fiskal, keuangan dan sektor riil dituangkan di dalam Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan *International Monetary Fund* (IMF). Salah satu isi dari Inpres tersebut adalah bagaimana pentingnya pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

Diamatkan dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 dijelaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Hal itulah yang menjadikan kekuatan dari perekonomian Indonesia. Perekonomian rakyat yang didominasi oleh keberadaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang juga berasaskan kekeluargaan. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku pembangunan, diharapkan mampu berperan sebagai penggerak pembangunan ekonomi, oleh karena itu agar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mampu tumbuh dan bergerak lebih luas diberbagai sektor usaha, perlu diberikan dukungan fasilitasi kebijakan, berbagi kemudahan, dan perlindungan.

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan aktivitasnya di berbagai sektor masih dihadapkan faktor keterbatasan dalam mengakses sumber daya manusia, manajemen, pembiayaan, pasar, informasi, dan teknologi. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan otonomi daerah, permasalahan yang mendasar adalah sampai seberapa jauh komitmen pemerintah daerah dalam memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah secara konseptual memiliki kewenangan dalam mengolah potensi sumberdaya yang ada pada masing masing daerah. Pemerintah daerah bersama sama *stakeholder* (pemerintah pusat, lembaga keuangan, BUMN/BUMD, swasta, dan perguruan tinggi secara bersama sama memberikan dukungan finansial (kredit, *softloan*, dan dukungan keuangan lainnya), dukungan non *financial* (perda, peraturan, SK dan peraturan lainnya) untuk kepentingan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang peduli dan memperhatikan keberadaan koperasi dan pengusaha industri kecil. Kemudahan permodalan bagi industri kecil menjadi bukti akan kepedulian tersebut. Tidak diijinkannya pembangunan pasar – pasar modern juga semakin membangkitkan dan memberikan ruang yang lebih luas kepada industri kecil untuk berkembang. Akan tetapi, hal tersebut kurang diimbangi dengan perbaikan dan pengembangan pasar – pasar tradisional yang digunakan oleh industri kecil untuk memasarkan barang yang dihasilkannya serta dukungan dari segi promosi dan lain sebagainya. Sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh pengusaha industri kecil semakin tak menentu dan kurang menjanjikan.

Menurut Suarja (2007:2-3), Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memiliki potensi yang besar dan strategis dalam rangka mengurangi kemiskinan, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya

pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja.

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu andalan utama bagi ketahanan ekonomi sebuah negara. Terbukti di masa krisis dengan bertumbuhan banyak usaha konglomerasi yang dililit hutang luar negeri, usaha kecil menengah terutama yang berorientasi ekspor justru meraup keuntungan yang luar biasa. Sebagian lagi survive dengan berbagai cara karena kecilnya investasi & modal yang berputar. Pemberdayaan usaha kecil menengah ini akan menjadi kunci utama supaya kemungkinan survive negeri ini menjadi lebih tinggi. Selain mampu menghadapi krisis ekonomi sekaligus dapat dijadikan sebagai katup pengaman perekonomian nasional dan daerah khususnya dalam penciptaan lapangan kerja baru. Namun pada era persaingan yang ketat ini, kondisi usaha mikro dan kecil, cukup menyedihkan. Karena itu, perlu dilakukan upaya penguatan agar usaha mikro dan kecil tersebut dapat tetap eksis dan bahkan bisa tumbuh kembang, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Upaya pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah dilakukan dengan langkah-langkah yang nyata. Namun, di masa depan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif menjadi penghambat bagi tumbuhnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satunya adalah masih besarnya biaya transaksi usaha sebagai akibat dari

ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi, serta masih adanya praktik bisnis serta persaingan usaha yang tidak sehat.

Selain itu, keterbatasan modal dan penguasaan teknologi pada sektor usaha mikro dan kecil berakibat sangat sulit untuk meningkatkan nilai tambah usahanya sehingga pendapatan yang diperoleh juga masih rendah. Demikian pula, kualitas kerja Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kurang baik berdampak pada lingkungan kerja dan produk yang dihasilkan menjadi kurang berdaya saing. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga masih menghadapi kendala keterbatasan pada akses pemasaran yang mempengaruhi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam meningkatkan kapasitas produksi dan usahanya. Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pemberdayaan koperasi adalah belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya.

Di samping itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang benar dalam berkoperasi. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul " Kajian Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Ngawi ".

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan usahanya?
3. Bagaimanakah komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?

## C. Tujuan

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi dalam mengembangkan usahanya.
- c. Untuk mengetahui komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

## D. Kegunaan

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam usaha pemecahan masalah – masalah pembangunan, khususnya bagi Pemerintah

Kabupaten Ngawi maupun pemerintah pusat, serta dapat dipakai sebagai acuan dan masukan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bagi para pengusaha yang termasuk dalam Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam melakukan evaluasi dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kearah yang lebih baik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemberdayaan

Secara etimologis pengertian pemberdayaan menurut Roesmidi dan Riza Risyanti (2006:1) berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan *ber-* menjadi kata "berdaya" artinya memiliki atau mempunyai daya. Kata "berdaya" apabila diberi apalan *pe-* dengan mendapat sisipan *-m-* dan akhiran *-an* menjadi "pemberdayaan" artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata "*power*", dalam bahasa Indonesia menurut Echols dan Shadily (1996:441) berarti "kekuasaan". Aileen Mitchell Stewart (2006:29) berpendapat bahwa pemberdayaan dapat mendatangkan manfaat, antara lain :

1. meningkatkan pelayanan kepada pelanggan;
2. memberikan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan kecakapan-kecakapan yang penting;
3. memberikan kepada staf rasa berprestasi yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan motivasi;
4. meningkatkan efektivitas organisasi.

Pemberdayaan merupakan upaya terencana untuk memandirikan masyarakat, agar mereka mampu mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Untuk memberdayakan masyarakat kelompok usaha kecil di perlukan suatu kebijakan, komitmen, organisasi, program serta pendekatan yang tepat. Lebih dari

itu diperlukan juga suatu sikap yang tidak memperlakukan masyarakat kelompok usaha kecil sebagai obyek, tetapi sebagai subyek. Masyarakat kelompok usaha kecil bukanlah orang yang tidak memiliki apapun, melainkan sekelompok orang yang mempunyai usaha yang potensi, tetapi kurang modal. (Sutrisno, 2010 : 20).

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne dalam Muchtar, 2007 : 2)

Pemberdayaan menurut Kartasamita dalam Sutrisno (2010 : 20) menyatakan bahwa memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat mastabat lapisan masyarakat, yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan perkataan lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Upayanya dapat dilakukan dengan tiga aspek. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang; kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat; ketiga, melindungi,

sehingga proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah menjadi semakin lemah akibatnya kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.

Menurut Hikmat (2006 : 43) pemberdayaan mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh atau kuat. Rappaport dalam Hikmat (2006 : 43), praktek dan kegiatan yang berbasiskan pemberdayaan adalah bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam bentuk simbol – simbol. Simbol – simbol tersebut kemudian mengomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk mengubah hal – hal yang terkandung dalam diri kita, orang – orang lain yang kita anggap penting serta masyarakat di sekitar kita.

Mark G. Hanna dan Buddy Robinson dalam Hikmat (2006 : 19) mengemukakan Stategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial adalah tradisional, *direct action* (aksi langsung) dan transformasi.

- a. Stategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan;
- b. Stategi *direct action* membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi;
- c. Stategi transformatif menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Pengertian pemberdayaan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan

pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas – luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu

Adapun tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok atau pemerintah untuk menjadikan sesuatu hal menjadi lebih baik dan berdaya guna dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Koperasi**

Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi. Perkoperasian di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur (Koperindo.com, 2001)

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Menurut *International Labour Organization* dalam Sitio dan Tamba : 2001, Elemen yang terkandung dalam koperasi adalah:

- a. perkumpulan orang-orang,
- b. penggabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan,
- c. terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai,
- d. koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis,
- e. terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan,
- f. anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

Koperasi merupakan badan usaha yang mempunyai ciri atau kekhasan tersendiri dibandingkan dengan usaha lainnya, diantaranya adalah usaha koperasi berdasarkan atas kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi diantara anggotanya, sedangkan usaha lain / bukan koperasi usahanya tidak harus sama dengan kebutuhan dan kepentingan pemilik modal, yang penting adalah kepemilikan modal. Berdasarkan pendirinya, koperasi sesuai dengan UU no. 25 Tahun 1992 dapat didirikan minimal oleh 20 orang, sedangkan bukan koperasi dapat didirikan oleh satu orang. Tujuan pendirian, koperasi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan anggota, di mana anggota sebagai pengguna, sedangkan bukan koperasi bertujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, di mana pemilik modal tidak harus sebagai pengguna.

Keunggulan koperasi adalah terletak pada kerjasama diantara para anggotanya. Dengan asas kebersamaan ini, maka volume usaha dapat diperbesar dan biaya dapat ditekan, cara yang dapat dipakai adalah dengan membeli atau menjual secara bersama-sama. Disamping itu, karena anggota adalah pemilik sekaligus pengguna pelayanan, maka koperasi memiliki potensi pasar yang cukup besar, bahkan dapat dikatakan hampir pasti.

### **C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan beberapa pengertian Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, yaitu :

” Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini. ”

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-. Memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

- Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;

- Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang - undang No. 9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan Ciri – ciri sebagai berikut :

- Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;

- Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
- Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Mempunyai ciri – ciri antara lain :

- Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Menurut data Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi Jumlah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah di Kabupaten Ngawi per 31 Desember 2010, sesuai dengan pemaparan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi dalam Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2010 dan Rencana Kegiatan Tahun 2011 Satjanis Bidang Ekonomi dan Pertanian Kabupaten Ngawi, adalah Jumlah Koperasi = 651 Unit; Jumlah Usaha Mikro Kecil = 33.598 Unit; dan jumlah Usaha Menengah = 4 Unit.

#### **D. Hasil Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya yaitu dilakukan oleh Saefulloh (2008), meneliti tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Provinsi Bali dan Sulawesi Utara). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menyatakan bahwa UKM masih banyak dihadapkan pada berbagai hambatan diantaranya adalah masalah Sumber Daya manusia dan kebutuhan modal. Begitu juga dengan pertumbuhan perkoperasian yang hanya terfokus untuk memenuhi pencapaian kuantitas akan tetapi kurang memperhatikan kualitas koperasi yang dibentuk. Kebijakan pemberdayaan UKM dilakukan melalui kebijakan teknis berupa surat keputusan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam mendukung promosi produk dengan cara menghibau agar para pendiri/ pengelola pasar swalayan/ supermarket untuk menyediakan tempat 10 persen dari luas bangunan bagi UKM berjualan/ berpromosi produk.

Suarja (2007), meneliti tentang Kebijakan Pemberdayaan UKM dan Koperasi Guna menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa UMKM pada dasarnya merupakan usaha yang memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut dikarenakan keunggulan UMKM yang mempunyai Karakter spesifik, yaitu :

1. Sebagian besar usaha KUMKM merupakan kegiatan padat karya, yang banyak memanfaatkan sumber daya lokal;
2. Selang waktu produksi relatif singkat, atau produksi dapat dilakukan secara cepat;
3. Nilai ICOR kegiatan KUMKM relatif rendah.

Selain itu, disamping mempunyai keunggulan, UMKM juga mengalami permasalahan yang tidak sedikit, diantaranya adalah kesulitan akses terhadap permodalan dasar, pasar, teknologi dan informasi serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM.

Primiana (2007), melakukan penelitian dengan judul *Optimalisasi Sinergitas Pemberdayaan UKM Kasus Kota Bandung*. Mengemukakan bahwa terdapat hal – hal pokok yang ditemukan selama melakukan penelitian, yaitu :

1. Perlunya pembinaan terhadap UKM secara menyeluruh dan sesuai kebutuhan;
2. Setelah ada bantuan modal harus terus di dampingi, artinya UKM tidak hanya semata – mata modal;
3. Sulit dalam memperoleh ijin, sehingga sulit akses ke perbankan;
4. Sulit memperoleh bahan baku, vahan baku membeli dari usaha besar dan bila permintaan naik, kadang – kadang sulit memperolehnya;

5. Mengoptimalkan sentra – sentra fokus serta memperluas hubungan antar sentra maupun antar daerah;
6. Memperkuat di dalam sentra dengan tidak saling menjatuhkan harga;
7. Belum adanya stándar baku mengenai metode pembinaan dan pengembangan UKM sehingga sulit untuk mendeteksi/ mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan program;
8. Banyaknya program yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan;
9. Banyaknya program yang tumpang tindih antar lembaga/ instansi pemerintah;
10. Perbedaan definisi antara UKM, UMKM dan IKM yang digunakan oleh lembaga/ instansi membingungkan para pelaku.

Adapun hambatan masalah yang dialami oleh para UKM adalah masalah permodalan dan pemasaran.

Darmawan (2011), meneliti tentang analisis faktor – faktor yang mempengaruhi keuntungan industri keripik tempe di Kabupaten Ngawi. Variabel bebasnya adalah modal, tenaga kerja, lama berusaha, pendidikan dan bantuan modal. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa modal, tenaga kerja, lama berusaha, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan industri keripik tempe di Kabupaten Ngawi. Sedangkan bantuan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap keuntungan industri keripik tempe di Kabupaten Ngawi.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian digunakan untuk mengulas, mengembangkan dan menguji kebenaran dalam rangka menemukan suatu pengetahuan dengan cara ilmiah. Ada berbagai metode yang dapat digunakan, tentunya metode yang akan dipilih harus sesuai dan berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang akan dilakukan penulis.

#### A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah yang ingin dikaji dan dari tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini lebih menekankan pada penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono 2006:11).

#### B. Populasi dan Sampel

Dalam sebuah penelitian sumber data sangat penting, karena merupakan obyek dari mana data diperoleh. Pemilihan dan penentuan sumber data itu tergantung pada permasalahan yang akan diselidiki. Nawawi (2005:140) berpendapat bahwa sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul menjadi tidak relevan sehingga dapat menimbulkan kekeliruan dalam

menarik kesimpulan. Penelitian yang menggunakan populasi dan sampel yang keliru tidak banyak artinya bagi pemecahan masalah yang dihadapi, bahkan akan menimbulkan masalah-masalah baru bilamana hasilnya dipergunakan untuk melakukan tindakan-tindakan praktis.

Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan obyek penelitian, dikenal dua jenis wilayah data yaitu populasi dan sampel.

#### **a. Populasi**

Sugiyono (2006:90) berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Kountur (2005:137) populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu obyek yang merupakan perhatian peneliti.

Arikunto (2006:108) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Jadi dapat dikatakan bahwa populasi bukan hanya orang, akan tetapi juga semua benda yang ada di wilayah penelitian yang berhubungan dengan hal-hal yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi, pelaku perkoperasian di Kabupaten Ngawi serta Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi.

#### **b. Sampel**

Menurut Sugiyono (2006:91), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan demikian dari populasi

yang tertera, peneliti dapat mempersempit dengan melakukan sampel tertentu terhadap responden. Penetapan sampel tersebut dikarenakan adanya keterbatasan yang dimiliki baik dari segi biaya, tenaga dan waktu dalam penelitian.

Dalam proses pengambilan data penulis menggunakan pendekatan dengan metode survey lapangan terhadap responden yang dipilih secara *purposive sampling*. Yaitu Pejabat di lingkup Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi, diantaranya adalah Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Bidang Data dan Informasi dan Kepala Sub bagian Perencanaan. Dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu LSM Palapa dan Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah serta pelaku perkoperasian yaitu Koperasi Unit Desa Teguhan dan pelaku UMKM yaitu ketua sentra industri keripik tempe, pengusaha kerajinan bonggol jati, pengusaha anyaman tas plastic, pengusaha kerajinan batik tulis, ketua pengusaha sentra kerajinan tas plastik dan pengusaha pembuatan *nata de coco*.

Adapun informasi yang dibutuhkan yaitu mengenai perkembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Ngawi, faktor apa yang menjadikan penghambat dalam melakukan upaya pemberdayaan dan UMKM dalam melakukan usahanya, program – program pemberdayaan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi.

### C. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan sumber data menurut Arikunto (2006:107) adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari tiga sumber yaitu *person*, *place* dan *paper*. Mengenai ketiga macam sumber data tersebut, Arikunto (2006:107) menjelaskan sebagai berikut:

1. *Person* yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui kuesioner. Sumber data *person* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pejabat di lingkup Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi serta pelaku perkoperasian dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Ngawi.
2. *Place* yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Sumber data *place* yang digunakan adalah kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi dan tempat dimana usaha mikro kecil dan menengah di jalankan.
3. *Paper* yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi. Sumber data *paper* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang ada di kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi dan literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Ada dua klasifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang secara langsung dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian. Dalam mengumpulkan data primer penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi/ pengamatan, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat bantu yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Nazir, 2005 : 234). Wawancara dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (Sugiyono, 2006 : 165). Penulis langsung turun ke lapangan mengamati fenomena – fenomena baik berupa kondisi fisik serta kegiatan sehari – hari yang dapat menunjang penelitian.

Data yang diperoleh secara langsung oleh penulis adalah hasil wawancara yang diambil dari responden yaitu pejabat di lingkup Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi serta pelaku perkoperasian dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Ngawi. Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah tentang bagaimana perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Ngawi, permasalahan apa yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan koperasi dan UMKM, permasalahan apa yang sering dikeluhkan oleh pelaku koperasi dan UMKM dalam menjalankan usahanya serta program – program pemberdayaan apa

yang di lakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya memajukan perkoperasian dan UMKM.

## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang sudah ada pada lokasi penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian. Penulis menggunakan teknik dokumentasi dalam memperoleh data sekunder, adapun pengertian dokumentasi adalah mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006 : 231). Penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk lebih memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi / pengamatan.

Data yang diambil peneliti berupa arsip-arsip, dokumen-dokumen dan monografi di kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi. Data sekunder yang akan di ambil oleh penulis adalah data tentang data profil koperasi dan UMKM di Kabupaten Ngawi dan arsip - arsip pendukung tentang perkoperasian dan KUKM.

### **D. Teknik Pengukuran Keabsahan Data**

Untuk mengetahui keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi, triangulasi adalah suatu teknik untuk mengecek keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi yaitu sumber, metode, penyidik dan teori (Moleong, 2002 : 178). Pada penelitian ini

menggunakan triangulasi sumber dan teori. Adapun metode triangulasi yang digunakan yakni :

1. Triangulasi Sumber

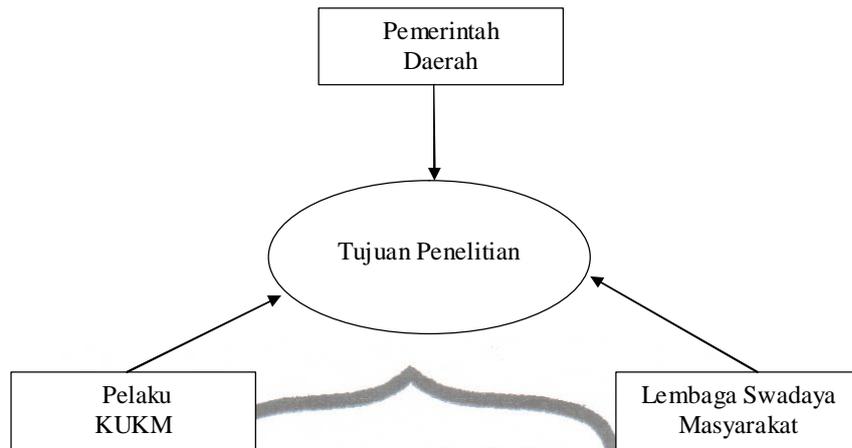
Model triangulasi sumber yakni membandingkan atau mengecek ulang hasil penelitian peneliti dengan hasil wawancara. Pada triangulasi sumber ini peneliti melakukan wawancara dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, pihak ketiga sebagai agen dalam melakukan pemberdayaan, serta pelaku perkoperasian dan UMKM sendiri.

2. Triangulasi Teori

Model triangulasi teori yakni memanfaatkan dua atau lebih teori untuk di adu dan di padu. Peneliti dalam hal ini memanfaatkan buku – buku maupun jurnal yang telah ada untuk menguji hasil penelitian dengan teori yang telah ada.

**E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dengan menggunakan metode triangulasi dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti pada gambar 3.1. Dengan melakukan pengecekan data dan informasi yang dilakukan terhadap beberapa sumber maka keabsahan data lebih terjamin, karena pada prinsipnya dalam penelitian kualitatif ini adalah bagaimana diperoleh data faktual sesuai dengan fenomena yang terjadi sehingga menghasilkan informasi yang faktual sesuai dengan tujuan penelitian.



Gambar 3.1  
Kerangka Pemikiran

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Ngawi

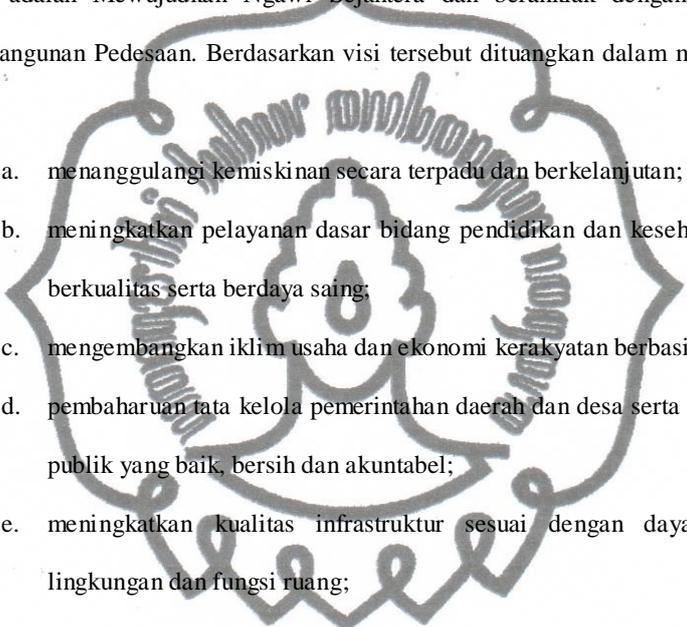
Kabupaten Ngawi adalah sebuah wilayah kabupaten di Propinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Kata Ngawi berasal dari kata awi, bahasa sansakerta yang berarti bambu dan mendapat imbuhan kata “ng” sehingga menjadi Ngawi hal ini karena secara historis dulu di Kabupaten Ngawi banyak terdapat pohon bambu.

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (keduanya termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten Bojonegoro di bagian utara, Kabupaten Madiun di bagian timur, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun di bagian selatan, serta Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) dibagian barat. Kabupaten Ngawi terdiri atas 19 kecamatan yang terbagi dalam sejumlah 217 (dua ratus tujuh belas) desa dan 4 kelurahan. Pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Ngawi. Kondisi geografis bagian utara merupakan perbukitan yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng. Bagian barat daya adalah kawasan pegunungan, bagian dari sistem Gunung Lawu.

Berdasarkan data kependudukan, sampai dengan tahun 2009 jumlah penduduk di Kabupaten Ngawi adalah 892.051 jiwa dengan sex ratio 96,56 dengan jumlah penduduk terbanyak terletak di Kecamatan Paron yaitu 89.366 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Kasreman

dengan jumlah penduduk 24.019 jiwa. Kecamatan Kasreman merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Padas. Dilihat dari kepadatannya, rata – rata Kabupaten Ngawi adalah 688 jiwa per km<sup>2</sup>, dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Ngawi yaitu 1.196 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan daerah dengan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Karanganyar dengan rata – rata 288 jiwa per km<sup>2</sup>.

Adapun visi misi Kabupaten Ngawi pada periode pemerintahan 2010 – 2015 adalah Mewujudkan Ngawi Sejahtera dan berahklak dengan Berbasis Pembangunan Pedesaan. Berdasarkan visi tersebut dituangkan dalam misi antara lain :

- 
- a. menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
  - b. meningkatkan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta berdaya saing;
  - c. mengembangkan iklim usaha dan ekonomi kerakyatan berbasis agraris;
  - d. pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan desa serta pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel;
  - e. meningkatkan kualitas infrastruktur sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang;
  - f. meningkatkan prestasi daerah;
  - g. meningkatkan budaya yang berlandaskan kearifan dan keagamaan dalam suasana yang kondusif.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka pemerintah daerah menetapkan beberapa program kerjasebagai berikut:

- a. *mbangun deso (makaryo bareng – bareng ngupokoro dan dandani deso)*;
- b. Akta Kelahiran, KK dan KTP gratis;
- c. Bebas retribusi pelayanan dasar kesehatan;
- d. Beasiswa siswa tidak mampu dan berprestasi;
- e. Sertifikat tanah gratis untuk keluarga miskin;
- f. Bedah rumah;
- g. Peningkatan ketahanan pangan daerah;
- h. Peningkatan produktifitas dan kualitas pertanian;
- i. Peningkatan produktifitas dan kualitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM).

Visi, misi dan program kepala daerah terpilih dijabarkan menjadi strategi pokok dan prioritas pembangunan, sasaran dan arah kebijakan, serta program – program dan kegiatan pokok dengan memperhatikan sumber daya, potensi yang dimiliki, faktor – faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan lima tahun yang lalu, dan isu – isu strategis yang berkembang serta rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Ngawi yang akan dijalankan lima tahun mendatang.

Untuk melaksanakan misi ke- 3 mengembangkan iklim usaha dan ekonomi kerakyatan berbasis agraris ditetapkan tujuan : terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Tujuan ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik dan meningkat. Meningkatnya

perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat.

Tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten Ngawi ke depan adalah terciptanya kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai apabila perputaran roda ekonomi berjalan dengan baik yang didukung oleh langkah dan tindakan pemerintah daerah dengan melakukan regulasi di berbagai bidang yang dapat menghilangkan hambatan investasi serta dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi yang berbasis usaha kecil dan menengah masyarakat. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah mempunyai peranan yang semakin penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

#### **B. Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi.**

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Kabupaten Ngawi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin berkembangnya jumlah KUMKM di Kabupaten Ngawi dari tahun ke tahunnya. Hal tersebut tak lepas dari upaya pemerintah daerah dan juga masyarakat yang merespons keberadaan KUMKM, sehingga KUMKM semakin berkembang. Perkembangan tersebut juga mengalami masa pasang surut, dimana

tidak sedikit juga KUMKM yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya dan akhirnya bangkrut atau gulung tikar.

### 1. Perkembangan Koperasi

Kabupaten Ngawi memiliki jenis koperasi yang cukup beragam, data Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi mencatat terdapat 21 jenis koperasi. Koperasi tersebut tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi, tepatnya di 19 Kecamatan. Berikut tabel jenis koperasi di Kabupaten Ngawi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

Tabel 4.1  
Jenis Koperasi di Kabupaten Ngawi  
(Tahun 2006 – 2011)

No	Jenis Koperasi	Jumlah (unit)					
		Th 2006	Th 2007	Th 2008	Th 2009	Th 2010	Th 2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koperasi Unit Desa (KUD)	30	30	30	30	30	30
2.	Koperasi Pertanian	107	101	113	113	114	120
3.	Kop. Tahu Tempe Indonesia	1	1	1	1	1	1
4.	Koperasi Industri Kerajinan	8	8	8	8	9	9
5.	Koppontren	12	13	13	13	14	15
6.	Kopkar	17	18	21	21	21	21
7.	Kop. Angkatan Darat	2	2	2	2	2	2
8.	Kop. Kepolisian	1	1	1	1	1	1
9.	Kop. Serba Usaha	50	50	62	62	62	71
10.	Kop. Pasar	8	8	8	8	8	8

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Kop. Simpan Pinjam	14	15	30	30	40	44
12.	Kop. Angkutan Darat	1	1	1	1	1	1
13.	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	67	68	65	65	67	67
14.	Koperasi Wanita	3	4	8	95	217	226
15.	Kop. Veteran	1	1	1	1	1	1
16.	Kop. Wredatama	8	8	8	8	8	8
17.	Kop. Pepabri	1	1	1	1	1	1
18.	Koperasi Pemuda	3	3	3	3	3	3
19.	Kop. Pedagang kaki Lima	3	3	3	3	3	3
20.	Kop. Lainnya + Koppermas	43	44	91	91	39	39
21.	Koperasi Sekunder	1	1	1	1	1	1
Jumlah		381	381	471	558	643	672

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, 2011.

Dari tabel diatas menunjukkan terdapat perkembangan dari jumlah koperasi di Kabupaten Ngawi yang mencerminkan adanya pertumbuhan yang cukup pesat. Keberadaan koperasi di tengah – tengah masyarakat dinilai sangat membantu dalam menggerakkan roda perekonomian terutama kalangan ekonomi kelas menengah kebawah. Dari tabel diatas juga menunjukkan bahwa Koperasi Wanita mendominasi dari jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi merupakan satu – satunya kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang setiap desanya sudah mempunyai koperasi wanita dan sudah berbadan hukum. Tercatat terdapat 226 unit koperasi wanita di Kabupaten Ngawi, Koperasi Wanita mempunyai peranan penting dalam upaya pemberdayaan perempuan khususnya perempuan di wilayah hutan.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi, Bapak Didik Dharmawan, menyatakan *“koperasi wanita menjadi idola di Kabupaten Ngawi, Pakde Karwo sangat mengapresiasi keberadaan koperasi wanita yang tumbuh sangat cepat di Kabupaten Ngawi. Setiap desa di tahun 2010 sudah mempunyai minimal satu koperasi wanita padahal jumlah desa mencapai 213 desa. Sasaran koperasi wanita pada awalnya adalah memberdayakan kelompok wanita desa hutan, dimana banyak sekali ibu rumah tangga khususnya yang ada di desa sekitar hutan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan hanya bercocok tanam seadanya. Dengan adanya koperasi ini mereka diberikan keterampilan membuat kerajinan tangan yang dapat menghasilkan uang. Alhamdulillah program tersebut berkembang dan mendapatkan respon yang positif”*. (Hasil wawancara tanggal 30 Januari 2012 bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi).

Dari pernyataan tersebut di atas penulis dapat melihat bahwa perkembangan koperasi di Kabupaten Ngawi berkembang dengan pesatnya, selain di tandai dengan semakin bertambahnya jumlah koperasi dari tahun ke tahun juga ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang menjadi anggota dari koperasi tersebut dan tertolong serta merasa sangat terbantu dengan adanya koperasi. Perkembangan koperasi di Kabupaten Ngawi, khususnya koperasi wanita, mendapat respon yang positif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dimana Gubernur Jawa Timur, Dr. Soekarwo, mengapresiasi dengan memberikan bantuan hibah sebesar Rp. 25.000.000,- kepada setiap koperasi wanita di Kabupaten Ngawi pada tahun 2009 dan 2010 yang disalurkan melalui Dinas Koperasi

UMKM dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi.

Tidak berhenti dalam hal itu saja, perkembangan koperasi di Kabupaten Ngawi juga ditandai dengan diperolehnya berbagai penghargaan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi. Pada tanggal 9 Juli 2001 bertempat di Jakarta, Kabupaten Ngawi mendapatkan penghargaan Bhakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Departemen Koperasi dan UMKM, berlanjut di tahun yang sama pada tanggal 15 Nopember, kabupaten Ngawi mendapatkan penghargaan Program KUD Mandiri dari Gubernur Jawa Timur.

Kabupaten Ngawi juga ditetapkan sebagai Kabupaten penggerak Koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM pada tanggal 25 September 2009 di Jakarta. Di Tahun 2010 sebagai tindak lanjut dari keberhasilan pengembangan koperasi wanita, kabupaten Ngawi mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai koperasi wanita terbaik, penghargaan tersebut di berikan di Surabaya pada tanggal 19 Nopember 2010. Tahun 2011 Kabupaten Ngawi juga mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai juara harapan I dalam acara Koperasi Award di Kabupaten Sumenep tanggal 19 Juli 2011.

Kepala Dinas Koperasi UMKM dan perindustrian juga menambahkan bahwa penghargaan – penghargaan yang di terima Kabupaten Ngawi dalam hal perkoperasian dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa perkoperasian di Kabupeten Ngawi mengalami perkembangan yang cukup baik. Kemudahan dalam hal ijin pendirian koperasi juga menjadi faktor yang menentukan tumbuh berkembangnya koperasi di Kabupaten Ngawi. Kepala Dinas

Koperasi UMKM dan Perindustrian juga menegaskan bahwa iklim usaha yang kondusif seperti ini akan semakin menjadikan koperasi di Kabupaten Ngawi semakin berkembang lagi.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, hal sama juga disampaikan oleh Bapak Hery dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Palapa, LSM Palapa merupakan LSM yang mengawal dan bermitra dengan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi dalam mengembangkan dan memajukan koperasi dan UMKM di Kabupaten Ngawi, bahwa *“Perkoperasian di Kabupaten Ngawi mengalami perkembangan yang membanggakan, terutama perkembangan koperasi wanita, beliau berpendapat bahwa koperasi wanita merupakan tonggak keberhasilan Kabupaten Ngawi dalam upayanya untuk memajukan dan memasyarakatkan koperasi. Pemerintah Daerah tidak hanya menjadikan kuantitas saja sebagai tolok ukur keberhasilan, akan tetapi juga mengutamakan kualitas”* (Hasil wawancara tanggal 2 Februari 2012 bertempat di ruang ajudan Bupati Ngawi). Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan Pemerintah Daerah selalu mengandeng pihak swasta dan LSM dalam mengawal upaya memajukan perkoperasian dengan seringnya mengadakan sosialisasi dan pelatihan terhadap masyarakat dan pelaku perkoperasian. Juga pemerintah daerah siap menampung keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku perkoperasian dan secara terbuka dan transparan memberikan solusi dan memfasilitasi dalam upaya memecahkan permasalahan yang ada.

Hal yang kurang lebih sama disampaikan oleh Pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Teguhan, Bapak Samidi, KUD Teguhan merupakan KUD yang mempunyai anggota terbesar yaitu berjumlah 10.417 anggota, nomor Badan Hukum 4034A/BH/II/1978 Tanggal 29 Juli 1981 yang beralamatkan di Jl. Raya Paron Jogorogo. Beliau berpendapat bahwa *“Perkembangan koperasi di Kabupaten Ngawi jika dikatakan berkembang pesat merupakan hal yang wajar, hal tersebut dikarenakan masyarakat Kabupaten Ngawi di dominasi oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh tani, dan juga bekerja di sektor jasa dan usaha mikro kecil. Tentu saja faktor kebutuhan masyarakat akan kopersilah yang menjadikan koperasi di Kabupaten Ngawi tumbuh dengan subur. Dan juga perkembangan yang pesat tersebut mendapatkan tempat dan perhatian di tingkat pemerintah daerah, sehingga ada keyakinan dan motivasi dari pemilik koperasi dan anggotanya untuk terus memajukan dan membesarkan koperasinya”* (Hasil wawancara tanggal 3 Februari 2012 bertempat di KUD Teguhan, Paron). Beliau menambahkan bahwa banyaknya koperasi yang bermunculan tidak menjadikan masalah dalam menjalankan usahanya, beliau berpendapat bahwa seringnya dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah menjadikan iklim persaingan usaha menjadi sehat.

Perkembangan koperasi juga dapat dilihat dari jumlah keanggotaan koperasi, besarnya modal sendiri, modal luar, volume usaha serta sisa hasil usaha yang dimiliki oleh koperasi tersebut. Berikut data dari Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian mengenai perkembangan koperasi dari Tahun 2006 – 2011 :

Tabel 4.2  
Perkembangan Koperasi Primer di Kabupaten Ngawi  
(Tahun 2006 – 2011)

No	Uraian	satuan	Tahun					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Koperasi	Unit	381	381	471	558	643	672
2.	Anggota	Orang	120.808	120.423	122.511	123.105	136.552	139.393
3.	Modal Sendiri	Juta Rp	27.960	33.831	34.549	39.627	54.419	56.848
4.	Modal Luar	Juta Rp	64.964	75.261	80.133	93.757	99.337	100.337
5.	Volume Usaha	Juta Rp	70.747	85.810	94.039	114.869	163.015	244.499
6.	Sisa Hasil Usaha	Juta Rp	3.335	3.637	3.180	3.557	7.022	12.250

Sumber : *Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi, 2011.*

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa dari tahun ke tahun perkembangan koperasi di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan . dari segi jumlah anggota koperasi Tahun 2007 mengalami penurunan sebanyak 385 anggota, akan tetapi penurunan tersebut tidak terjadi di tahun berikutnya, dimana pada tahun 2008 mengalami kenaikan yang signifikan sejumlah 2088 anggota. Dan perkembangan yang cukup baik tersebut terjadi sampai dengan tahun – tahun berikutnya. Dari segi modal, baik modal sendiri maupun modal dari luar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Volume usaha dan sisa hasil usaha

juga mengalami hal yang serupa, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Hasil temuan di lapangan menjelaskan bahwa perkembangan koperasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan koperasi mencakup jumlah keanggotaan koperasi, manajemen yang tangguh, besarnya modal, serta volume usaha yang dikelola. Hasil temuan di lapangan menyatakan bahwa keempat faktor tersebut mempunyai ketekaitan satu dengan yang lainnya. Semakin besar jumlah anggota koperasi akan semakin sulit dalam mengendalikan koperasi tersebut, dikarenakan koperasi tersebut harus mampu mengakomodir dan melayani semua segmen anggota, oleh karena itu mempertahankan sifat keanggotaan yang terbuka dan bersifat sukarela mutlak diperlukan. Selain itu, semakin banyaknya jumlah anggota membutuhkan bentuk manajemen dengan sistem pengawasan yang tangguh. Lemahnya manajerial dalam pengelolaan koperasi sering menjadi penyebab kegagalan koperasi. Besarnya jumlah anggota juga mempengaruhi besarnya modal yang diterima oleh koperasi. Semakin besar jumlah anggota maka semakin besar pula jumlah modal yang diterima, begitu juga sebaliknya. Modal menjadi faktor dasar dalam koperasi menjalankan usahanya. Faktor besarnya volume usaha sangat berpengaruh terhadap besarnya keuntungan yang nantinya akan diterima anggota melalui penerimaan sisa hasil usaha.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan koperasi adalah iklim usaha yang kondusif dan tingkat kepercayaan masyarakat. Penciptaan iklim usaha yang kondusif menjadi peran pemerintah yang sangat

dominan dengan memberikan fasilitasi kebijakan yang mampu mendorong perkembangan koperasi. Diantaranya adalah kemudahan dalam perijinan pendirian koperasi serta pemberian pelatihan pengelolaan manajerial koperasi. Temuan dilapangan menyatakan bahwa selama ini pemerintah memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan koperasi serta memberikan ruang yang terbuka untuk mendirikan koperasi. Tingkat kepercayaan masyarakat juga menjadi faktor dari luar yang mempengaruhi perkembangan koperasi. Tolok ukur yang dipergunakan dalam menilai kepercayaan masyarakat adalah dapat terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat melalui koperasi. Selama ini, masyarakat yang didominasi oleh kelas menengah kebawah memanfaatkan koperasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup.

## **2. Perkembangan UMKM di Kabupaten Ngawi**

UMKM di Kabupaten Ngawi merupakan pilar karena menjadi tiang dalam menunjang perekonomian masyarakat. Perekonomian yang berbasis pada ekonomi kerakyatan akan semakin tangguh jika didukung oleh pilar atau tiang yang kuat. Ketangguhan UMKM dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mempunyai peran yang sangat tinggi dalam penyerapan tenaga kerja. UMKM juga mengalami pasang surut dalam melaksanakan usahanya, banyak UMKM yang gulung tikar yang dikarenakan berbagai macam faktor. Selain itu UMKM juga menjadi usaha yang tetap banyak bertahan meskipun ditempa badai krisis ekonomi, hal itu dapat dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah UMKM

di Kabupaten Ngawi. Berikut data jumlah pengusaha kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Ngawi menurut sektor usaha industri pertanian dan industri non pertanian dari tahun 2006 – 2010 :

Tabel 4.3

Jumlah Pengusaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi Menurut Sektor Usaha Tahun 2006 – 2010

No	Kecamatan	Industri Pertanian	Industri Non-Pertanian	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Sine	64	1524	1588
2.	Ngrambe	28	2316	2344
3.	Jogorogo	7	1946	1953
4.	Kendal	50	1162	1212
5.	Geneng	141	2449	2590
6.	Gerih	10	956	966
7.	Kwadungan	190	1313	1503
8.	Pangkur	3	1167	1170
9.	Karangjati	197	2135	2332
10.	Bringin	-	667	667
11.	Padas	47	1115	1162
12.	Kasreman	2	620	622
13.	Ngawi	59	4367	4426
14.	Paron	33	3450	3483
15.	Kedungalar	11	1787	1798
16.	Pitu	8	598	606
17.	Widodaren	8	2959	2967
18.	Mantingan	149	1695	1844
19.	Karanganyar	33	349	382

<b>Jumlah</b>	<b>1040</b>	<b>32575</b>	<b>33615</b>
Tahun 2009	3377	30509	33886
Tahun 2008	3377	30509	33886
Tahun 2007	554	31421	31975
Tahun 2006	559	30979	31538

Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi, 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa wilayah Kecamatan Ngawi mempunyai jumlah pengusaha kecil dan menengah terbanyak dibandingkan dengan wilayah – wilayah yang lain. Selain Kecamatan Ngawi sebagai pusat pemerintahan, di Kecamatan Ngawi juga terdapat banyak sentra – sentra industri terutama industri keripik tempe, data pada Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian sentra industri keripik tempe di Kecamatan Ngawi mencapai 396 unit usaha dan mempunyai tenaga kerja sebanyak 1164 orang. Sentra industri keripik tempe di Kecamatan Ngawi mempunyai kapasitas produksi 4 juta kg per tahunnya dengan nilai produksi sebesar Rp. 45.600.000.000,- per tahunnya sehingga mempunyai nilai investasi sebesar Rp. 2.188.645.000,-.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sudarno yang merupakan ketua dari sentra industri keripik tempe di Kecamatan Ngawi yang berlatamkan di Dusun Karangtengah Desa Prandon. Mengatakan bahwa *“Industri keripik tempe merupakan salah satu industri kecil yang sangat bergairah di Kabupaten Ngawi, hal tersebut dikarenakan keripik tempe menjadi ikon dari Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi terkenal akan kripik tempennya yang mempunyai ciri khas tersendiri. Pemasaran keripik tempe pun sudah sampai ke luar kabupaten bahkan di luar Provinsi Jawa Timur”* (Hasil wawancara

*tanggal 5 Februari 2012 bertempat di kediaman Bapak Sudarno). Bapak Sudarno menambahkan bahwa industri keripik tempe sudah menjadi industri yang turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyangnya, dari tahun ke tahun perkembangannya semakin pesat mulai dari unit usaha serta jumlah produksinya. Tak ingin tertinggal dengan produksi – produksi yang lain, industri keripik tempe pun berkembang sampai pada bentuk kemasannya sehingga akan lebih menarik konsumen.*

*Hal sedikit berbeda disampaikan oleh Ibu Syela, yang merupakan Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian RI yang bertugas di Kabupaten Ngawi. Menyampaikan bahwa “Industri Keripik Tempe harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah, pemerintah daerah harus bertanggung jawab terhadap maju mundur dan berkembangnya industri keripik tempe. Hal tersebut dikarenakan keripik tempe yang sudah menjadi ikon dan ciri khas dari kabupaten Ngawi akan tersaingi oleh industri – industri lain yang sejenis dari luar Kabupaten Ngawi” (Hasil wawancara Tanggal 8 Februari 2012 bertempat di Kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi). Adapun saran yang disampaikan oleh beliau yaitu pemerintah daerah harus membuat gebrakan tingkat regional propinsi bahkan tingkat nasional dengan membuat pemecahan rekor Muri (Museum Rekor Indonesia) yang berhubungan dengan tempe ataupun kegiatan – kegiatan lain yang berskala nasional, dengan harapan industri kerupik tempe di Kabupaten Ngawi akan semakin dikenal oleh masyarakat luas.*

Tidak hanya industri keripik tempe saja yang berkembang di Kabupaten Ngawi, banyak industri – industri lain yang berkembang yang mempunyai nilai produksi dan nilai investasi yang besar serta menyediakan cukup banyak lapangan pekerjaan. Industri kecil dan menengah di Kabupaten Ngawi mempunyai beberapa macam jenis usaha yang terbagi dalam sentra – sentra industri yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi. Berikut data profil sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi Tahun 2011 :

Tabel 4.4

## Daftar Profil Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi Tahun 2011

1.	Nama Sentra : Tempe Lokasi : Ds. Tulakan, Sine Unit Usaha : 31 unit Tenaga Kerja : 92 orang N. Investasi : Rp. 10.850.000,- N. Prod. : Rp. 2.319.188.000,- Pemasaran : Lokal 100%	2.	Nama Sentra : Tape Lokasi : Ds. Ngendeng, Sine Unit Usaha : 14 unit Tenaga Kerja : 52 orang N. Investasi : Rp. 1.050.000,- N. Prod. : Rp. 577.500,- Pemasaran : Lokal 100%
3.	Nama Sentra : Genteng Lokasi : Ds. Pocol, Sine  Unit Usaha : 11 unit Tenaga Kerja : 22 N. Investasi : Rp. 7.700.000,- N. Prod. : Rp. 495.000.000,- Pemasaran : Lokal 50 %, Regional 50 %	4.	Nama Sentra : Genteng Lokasi : Ds. Baderan, Geneng Unit Usaha : 20 unit Tenaga Kerja : 50 orang N. Investasi : Rp. 78.000.000,- N. Prod. : Rp. 900.000.000,- Pemasaran : Lokal 50% Regional 50 %
5.	Nama Sentra : Anyaman Bambu Lokasi : Ds. Sumberejo, Sine  Unit Usaha : 80 unit Tenaga Kerja : 160 orang N. Investasi : Rp. 4.500.000,- N. Prod. : Rp. 142.560.000,-	6.	Nama Sentra : Anyaman tas plastik Lokasi : Ds. Sembung, Karangjati Unit Usaha : 72 unit Tenaga Kerja : 150 unit N. Investasi : Rp. 1.350.000,- N. Prod. : Rp. 1.166.400.000,-

	Pemasaran	: Lokal 100 %		Pemasaran	: Lokal 50 % Regional 25 % Nasional 25 %
7.	Nama Sentra Lokasi Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Anyaman tas plastik : Ds. Brangol, Karangjati : 75 unit : 160 orang : Rp. 1.664.000,- : Rp. 1.012.500.000,- : Lokal 50 % Regional 25 % Nasional 25 %	8.	Nama Sentra Lokasi Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Anyaman tas plastik : Ds. Jatipuro, Karangjati : 15 unit : 45 orang : Rp. 600.000,- : Rp. 405.000.000,- : Lokal 50 % Regional 25 % Nasional 25 %
9.	Nama Sentra Lokasi Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Ayaman tas plastik : Ds. Kedungprahu, Padas : 26 unit : 52 orang : Rp. 832.000,- : Rp. 351.000.000,- : Lokal 50 % Regional 25 % Nasional 25 %	10.	Nama Sentra Lokasi Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Ayaman tas plastik : Ds. Sukowiyono, Padas : 130 unit : 239 orang : Rp. 1.664.000,- : Rp. 1.755.000.000,- : Lokal 50 % Regional 25 % Nasional 25 %
11.	Nama Sentra Lokasi Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Ayaman tas plastik : Ds. Sumberbening, Bringin : 104 unit : 208 orang : Rp. 1.456.000,- : Rp. 1.404.000.000,- : Lokal 50 % Regional 25 % Nasional 25 %	12.	Nama Sentra Lokasi Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Ayaman tas plastik : Ds. Pohkonyal, Pangkur : 130 unit : 260 orang : Rp. 30.000.000,- : Rp. 1.110.000.000,- : Lokal 50 % Regional 25 % Nasional 25 %
13.	Nama Sentra Lokasi Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Ayaman tas plastik : Ds. Paras, Pangkur : 41 unit : 41 orang : Rp. 1.014.000,- : Rp. 892.980.000,- : Lokal 50 % Regional 25 %	14.	Nama Sentra Lokasi Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Ayaman bambu : Ds. Pangkur, Pangkur : 37 unit : 78 orang : Rp. 1.872.000,- : Rp. 278.100.000,- : Lokal 50 % Regional 50 %

		Nasional 25 %			
15.	Nama Sentra Lokasi  Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Tempe : Ds. Gendingan, Widodaren  : 25 unit : 44 orang : Rp.8.426.000,- : Rp.1.539.000.000,- : Lokal 100 %	16.	Nama Sentra Lokasi  Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Batik tulis : Ds.Banyubiru, Widodaren  : 85 unit : 123 orang : Rp.3.390.000,- : Rp.239.250.000,- : Lokal 50 % Regional 25 % Nasional 25 %
17.	Nama Sentra Lokasi  Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Krupuk : Ds. Dumplengan, Pitu  : 12 unit : 24 orang : Rp.14.000.000,- : Rp.141.750.000,- : Lokal 100 %	18.	Nama Sentra Lokasi  Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Genteng : Ds. Kedungharjo, Mantingan  : 25 unit : 52 orang : Rp.49.400.000,- : Rp.1.125.000.000,- : Lokal 50 % Regional 50 %
19.	Nama Sentra Lokasi  Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Anyaman bambu : Ds. Brubuh, Jogorogo  : 102 unit : 256 orang : Rp.5.096.000,- : Rp.689.250.000,- : Lokal 100 %	20.	Nama Sentra Lokasi  Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Anyaman bambu : Ds. Jaten, Jogorogo  : 129 unit : 393 orang : Rp.6.448.000,- : Rp.1.404.680.000,- : Lokal 100 %
21.	Nama Sentra Lokasi  Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Anyaman bambu : Ds.Tanjungsari, Jogorogo  : 35 unit : 70 orang : Rp.1.248.000,- : Rp.415.800.000,- : Lokal 100 %	22.	Nama Sentra Lokasi  Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Tempe : Ds.Pucangan, Ngrambe  : 9 unit : 15 orang : Rp.2.059.000,- : Rp.554.040.000,- : Lokal 100 %
23.	Nama Sentra Lokasi	: Parut kelapa : Ds.Ngale, Paron	24.	Nama Sentra Lokasi	: Sapu sabut : Ds.Semen, Paron

	Unit Usaha : 116 unit Tenaga Kerja : 223 orang N. Investasi : Rp.2.912.000,- N. Prod. : Rp.600.000.000,- Pemasaran : Lokal 50 % Regional 50 %		Unit Usaha : 50 unit Tenaga Kerja : 100 orang N. Investasi : Rp.10.000.000,- N. Prod. : Rp.144.000.000,- Pemasaran : Lokal 100 %
25.	Nama Sentra : Batu bata Lokasi : Ds.Gelung, Paron  Unit Usaha : 51 unit Tenaga Kerja : 102orang N. Investasi : Rp.6.000.000,- N. Prod. : Rp.1.377.000.000,- Pemasaran : Lokal 100 %	26.	Nama Sentra : Emping mlinjo Lokasi : Ds.Kletekan, Jogorogo  Unit Usaha : 48 unit Tenaga Kerja : 102 orang N. Investasi : Rp.4.784.000,- N. Prod. : Rp.156.354.000,- Pemasaran : Lokal 100 %
27.	Nama Sentra : Anyaman Bambu Lokasi : Ds.Dero, Padas  Unit Usaha : 25 unit Tenaga Kerja : 50 orang N. Investasi : Rp.1.456.000,- N. Prod. : Rp.266.976.000,- Pemasaran : Lokal 100 %	28.	Nama Sentra : Krepik Tempe Lokasi : Ds.Karangtengah, Ngawi  Unit Usaha : 396 unit Tenaga Kerja : 1164 orang N. Investasi : Rp.2.188.645.000,- N. Prod. : Rp.45.600.000.000,- Pemasaran : Lokal 50 % Regional 25 % Nasional 25 %
29.	Nama Sentra : Tempe Lokasi : Ds.Purwosari, Kwadungan  Unit Usaha : 20 unit Tenaga Kerja : 40 orang N. Investasi : Rp.13.520.000,- N. Prod. : Rp.2.708.640.000,- Pemasaran : Lokal 50 % Regional 50 %	30.	Nama Sentra : Anyaman bambu Lokasi : Ds.Gendol, Sine  Unit Usaha : 9 unit Tenaga Kerja : 18 orang N. Investasi : Rp.450.000,- N. Prod. : Rp.177.390.000,- Pemasaran : Lokal 100 %
31.	Nama Sentra : Anyaman tas plastik Lokasi : Ds.Gandri, Pangkur  Unit Usaha : 5 unit Tenaga Kerja : 10 orang N. Investasi : Rp.250.000,-	32.	Nama Sentra : Kerajinan bonggol jati Lokasi : Bangunrejo Kidul, Kedunggalar  Unit Usaha : 15 unit Tenaga Kerja : 85 orang N. Investasi : Rp.1.500.000.000,-

	N. Prod. Pemasaran	: Rp.178.200.000,- : Lokal 50 % Regional 25 % Nasional 25 %		N. Prod. Pemasaran	: Rp.1.350.000.000,- : Lokal 50 % Regional 25 % Nasional 25 %
33.	Nama Sentra Lokasi Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Kerajinan bonggol jati : Ds. Jenggrik, Kedunggalar : 5 unit : 75 orang : Rp.900.000.000,- : Rp.1.462.500.000,- : Lokal 50 % Regional 25 % Nasional 25 %	34.	Nama Sentra Lokasi Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Anyaman banbu : Ds. Sumbersari, Sine : 14 unit : 28 orang : Rp.7.000.000,- : Rp.50.820.000,- : Lokal 100 %
35.	Nama Sentra Lokasi Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Batu bata : Ds.Legowetan, Bringin : 8 unit : 16 orang : Rp.800.000,- : Rp.229.500.000,- : Lokal 100 %	36.	Nama Sentra Lokasi Unit Usaha Tenaga Kerja N. Investasi N. Prod. Pemasaran	: Batik tulis : Ds.Munggut, Padas : 30 unit : 40 orang : Rp.15.000.000,- : Rp.312.000.000,- : Lokal 50 % Regional 25 % Nasional 25 %

Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kab. Ngawi, Tahun 2011

Dari data diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Ngawi mempunyai sentra – sentra industri kecil dan menengah, yang diantaranya menjadi produk unggulan industri kecil dan menengah Kabupaten Ngawi. Sentra industri keripik tempe di Desa Karangtengah Kecamatan Ngawi menjadi produk yang mempunyai nilai investasi paling besar yakni Rp. 2.188.645.000,- dengan nilai produksi mencapai Rp. 45.600.000.000,- per tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa industri keripik tempe menjadi unggulan dari industri kecil dan menengah

di Kabupaten Ngawi. Industri keripik tempe juga mempunyai wilayah pemasaran tidak hanya di lokal Ngawi saja, akan tetapi sudah mencapai tingkat regional dan nasional. Selain keripik tempe Kabupaten Ngawi juga mempunyai sentra industri yang bernilai investasi dan nilai produksi yang besar, yaitu kerajinan bonggol jati di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar yang mempunyai nilai investasi Rp. 1.500.000.000,- dan nilai produksi yang mencapai Rp. 1.350.000.000,- per tahunnya. Kerajinan bonggol jati juga mempunyai pemasaran yang sudah mencapai tingkat nasional.

Selain industri keripik tempe dan industri kerajinan bonggol jati Kabupaten Ngawi juga mempunyai produk – produk unggulan yang lain diantaranya yaitu kerajinan anyaman plastik, batik tulis serta kerajinan anyaman bambu. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi, Bapak Didik Darmawan, menjelaskan bahwa Kabupaten Ngawi mempunyai program Ngawi Berbudaya yang diantaranya adalah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih mencintai produk dari Ngawi khususnya batik tulis khas Ngawi, oleh karena itu pemerintah daerah sedang giat – giatnya untuk mengembangkan industri batik tulis. Hal tersebut dimulai dengan program pemerintah daerah dan nasional untuk menggunakan pakaian batik kepada seluruh pegawai setiap hari Kamis dan Jumat. Pemerintah daerah juga mengenalkan karya batik khas Ngawi dengan mengadakan lomba desain batik khas Ngawi. Yang kemudian desain batik tersebut akan diproduksi secara massal. Dan menganjurkan kepada seluruh pegawai pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menggunakan batik khas Ngawi tersebut.

Menurut Ibu Siwi, pengrajin batik tulis dari Desa Munggut Kecamatan Padas, Menyatakan bahwa *“Perkembangan industri batik tulis Ngawi mengalami titik perkembangan yang menggembirakan, pemerintah daerah membuka kesempatan dan jalan yang seluas – luasnya kepada pengrajin batik tulis untuk mengembangkan industrinya, seperti diketahui sebelumnya bahwa industri batik tulis Ngawi mengalami masa yang suram dikarenakan batik tulis Ngawi masih kalah bersaing dengan batik – batik dari Solo, Jogjakarta dan Pekalongan. Akan tetapi dengan adanya program pemerintah ini industri batik tulis di Kabupaten Ngawi semakin berkembang dan mulai dicintai oleh masyarakat”* (Hasil wawancara tanggal 9 Februari 2012 bertempat di kediaman Ibu Siwi).

Produk unggulan lainnya yang sudah mencapai pemasaran tingkat nasional adalah anyaman tas plastik. Data diatas menunjukkan bahwa kerajinan tas plastik di Kabupaten Ngawi secara keseluruhan mempunyai nilai produksi Rp. 7.275.080.000,- , selain nilai produksi yang cukup besar kerajinan tas plastik juga menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, tercatat terdapat 1015 orang yang bekerja di sektor industri kerajinan anyaman tas plastik. Pekerja tersebut didominasi oleh kaum wanita, kaum wanita lebih diberdayakan dalam pembuatan anyaman tas plastik khususnya perempuan desa hutan yang tergabung dalam koperasi wanita. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Suluh, Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi, bahwa *“Industri anyaman tas plastik menjadi trend dikalangan masyarakat Ngawi, kapasitas produksi selama tahun 2011 tercatat mencapai 1.640.310 buah. Masyarakat lokal mendominasi permintaan dari kerajinan tas*

*plastik tersebut. Sebagian besar pekerja memang berasal dari kaum wanita terutama ibu – ibu rumah tangga yang tidak mempunyai kegiatan sehari – harinya, sehingga melalui koperasi wanita dan bantuan dari LSM Palapa pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian melakukan pembinaan dengan mengadakan pelatihan – pelatihan cara pembuatan kerajinan anyaman tas plastik. Dengan tujuan agar semakin produktif dan dapat menunjang perekonomian keluarga”(Hasil wawancara tanggal 8 Februari 2012 bertempat di Kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian kabupaten Ngawi). Hal yang sama diutarakan oleh Bapak Handoko, pemilik usaha kerajinan anyaman tas plastik Empu Setra, bahwa “Untuk meningkatkan produksi serta perekonomian masyarakat, saya mengajak kaum ibu – ibu yang ada di desa untuk ikut serta dalam proses produksi pembuatan anyaman tas plastik. Mereka diberi bekal pengetahuan dan ketrampilan cara membuat anyaman tas plastik sampai benar – benar mahir dan bisa menghasilkan anyaman tas plastik sesuai standar. Hasil dari setiap kerajinan yang mereka hasilkan akan saya berikan imbalan yang sesuai” (Hasil wawancara tanggal 9 Februari 2012 bertempat di rumah Bapak Handoko).*

Hasil temuan di lapangan menunjukkan terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan UMKM di Kabupaten Ngawi. Faktor internal meliputi modal, tenaga kerja, teknologi, pemasaran, inovasi dan manajemen usaha. Faktor modal menjadi faktor dominan dalam perkembangan UMKM, terutama terjadi pada UMKM yang baru berkembang dan baru memulai usaha. Faktor tenaga kerja berhubungan erat dengan kemampuan sumber daya

yang dimiliki, sumber daya yang handal dipercaya dapat meningkatkan mutu dan peningkatan jumlah produksi. Faktor teknologi peralatan merupakan faktor yang menentukan akan tinggi rendahnya tingkat produktifitas. Dengan penerapan teknologi yang canggih dan tepat guna, UMKM akan lebih dapat mempermudah dalam memproduksi dan semakin meningkatkan kualitas dari hasil produksi. Faktor inovasi memberikan peran penting dimana UMKM yang mempunyai inovasi dalam mendesain dan memproduksi barang akan lebih dilirik oleh konsumen. Inovasi yang dikembangkan tidak hanya untuk produksi kerajinan barang pakai saja akan tetapi juga diperlukan dalam usaha kuliner atau makanan. Faktor manajemen usaha menjadi faktor dasar dalam mempengaruhi perkembangan UMKM. Dengan manajemen usaha yang bagus akan lebih memudahkan UMKM dalam menjalankan usahanya. Akan tetapi hal tersebut tidak dimiliki oleh semua UMKM yang ada di Kabupaten Ngawi, dan masih menjadikan hambatan dalam perkembangan UMKM. Faktor pemasaran merupakan ujung tombak yang mempengaruhi perkembangan UMKM. Permasalahan utama yang di hadapi adalah terbatasnya pasar yang dapat ditembus oleh UMKM, kondisi ini terlihat dari ruang pasar yang dimasuki oleh produk – produk UMKM pada umumnya adalah pasar lokal dan hanya sedikit yang mampu menembus pasar global. Di Kabupaten Ngawi hanya produk – produk unggulan yang mampu bersaing dengan pasar global, diantaranya yaitu kerajinan bonggol jati (kayu primitiv) dan kerajinan anyaman tas plastik. Dari beberapa faktor tersebut diatas mempunyai hubungan dan saling keterkaitan satu dengan yang lain.

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan UMKM adalah peran pemerintah daerah, ketersediaan bahan baku, kondisi ekonomi dan stabilitas keamanan. Peran pemerintah daerah sangat terasa dalam mempengaruhi perkembangan UMKM, melalui fasilitator Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya dalam memberdayakan dan memacu perkembangan UMKM. Program – program yang langsung bersinggungan dengan UMKM menjadi prioritas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Mulai dari melakukan pembinaan dengan melakukan berbagai macam pelatihan dan sosialisasi, pemberian bantuan permodalan, fasilitasi pemecahan permasalahan yang terjadi sampai dengan upaya pemasaran produk dengan mengikuti pameran produk unggulan ditingkat regional maupun nasional. Temuan dilapangan menyatakan bahwa program – program unggulan Dinas Koperasi UMKM dan perindustrian terkait sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah dalam menggairahkan ekonomi kerakyatan dan melaksanakan pembangunan ditingkat pedesaan. Faktor ketersediaan bahan baku merupakan sumber utama dalam pelaksanaan produksi UMKM, hasil temuan di lapangan UMKM tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam memperoleh bahan baku. Bahan baku diperoleh lebih banyak dari daerah sendiri tetapi juga tidak jarang harus memasok dari daerah lain. Produk unggulan UMKM yang mendapatkan bahan baku dari daerah sendiri yaitu produk kerajinan bonggol jati atau kayu primitif, dimana Kabupaten Ngawi sangat potensial sekali untuk menggalakkan produk unggulan tersebut dikarenakan ketersediaan bahan baku yang mencukupi. Kondisi perekonomian dan stabilitas ekonomi merupakan faktor yang secara

langsung akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan UMKM. Kondisi perkonomian secara tidak langsung akan mempengaruhi faktor produksi dan kekuatan konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan.

### **C. Hambatan Pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Menjalankan Usahanya.**

Potensi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Ngawi, bahkan menjangkau sampai di pelosok desa, telah mewarnai gerak kehidupan masyarakat sehari – hari sebagai sumber lapangan kerja dan berwira usaha yang cukup memberikan kontribusi besar terhadap laju perekonomian warga. Dinas koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi sebagai *leading sector* dalam pengembangan koperasi dan UMKM mempunyai peran penting dalam upaya untuk memajukan koperasi dan UMKM tersebut. Akan tetapi hambatan – hambatan selalu ada dan menjadi tantangan dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di Kabupaten Ngawi. Hambatan – hambatan tersebut terutama yang berasal dari pelaku koperasi dan UMKM tersebut.

Menurut data Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi yang diperkuat dengan pernyataan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi, terdapat 5 (lima) aspek masalah – masalah yang melekat pada koperasi dan UMKM, yaitu :

- a. Permodalan;
- b. Pemasaran;

- c. Teknologi;
- d. Manajemen; dan
- e. Sumber Daya Manusia.

Keterbatasan modal usaha dan akses untuk memperolehnya merupakan masalah klasik yang dihadapi KUMKM. Hasil temuan di lapangan melalui wawancara dengan pelaku usaha mikro, Ibu Sunarsih, menyatakan dan mengakui bahwa seringkali mendapatkan modal usaha akan tetapi modal usaha yang diperoleh tidak digunakan untuk kegiatan usahanya tersebut, akan tetapi lebih di pakai untuk keperluan rumah tangga yang mendesak.

Hal tersebut sesuai dengan yang di katakan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi, sesuai dengan hasil wawancara mengatakan bahwa *“Itulah yang menjadi masalah klasik dalam hal permodalan UMKM, mereka lebih sering menggunakan bantuan modal yang diperoleh untuk kegiatan konsumtif yang tidak ada sangkut – pautnya dengan usaha yang mereka jalankan. Mereka cenderung tidak memiliki modal cadangan untuk menghadapi situasi yang terjadi secara tiba – tiba”*(Hasil wawancara Tanggal 30 Januari 2012 bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi .

Hal senada juga diutarakan oleh Ibu Syela, Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil Menengah, bahwa *“Mereka masih mempunyai pola pikir tradisional dan konsumtif dimana usaha yang mereka jalankan dan hasil dari pendapatannya hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup pada hari itu. Mereka tidak berpikir bagaimana bisa mengembangkan usahanya agar lebih besar lagi. Ini merupakan*

*ciri khas dari usaha mikro yang berjumlah cukup banyak” (Hasil wawancara Tanggal 8 Februari 2012 bertempat di Kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi). Menurut pengamatan beliau bahwa dari kalangan usaha mikro ini juga ada yang bertahan dan berkembang menjadi usaha kecil, yang memiliki ketekunan usaha dan pantang menyerah dalam menjalankan usahanya.*

Permasalahan dalam hal permodalan usaha kecil terutama usaha mikro yang lainnya adalah permodalan melalui kredit. Persyaratan yang ketat dalam pemberian kredit dari pihak perbankan menjadi permasalahan sehingga sulit bagi usaha kecil apalagi usaha mikro untuk memenuhinya. Di lain pihak juga pihak perbankan menyalurkan kredit berdasarkan kehati – hatian agar kredit yang disalurkan tidak macet. Usaha mikro dan kecil lebih cenderung menggunakan jasa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjalankan usahanya di bidang simpan pinjam atau yang lebih sering dikenal dengan ‘Bank Titil’ atau rentenir. Usaha mikro dan kecil beranggapan bahwa dengan menggunakan jasa *bank titil* lebih mudah dalam memperoleh pinjaman untuk modal baik dalam bentuk barang maupun uang, meskipun mereka harus membayar dengan bunga pinjaman yang lebih tinggi. Selain lebih mudah usaha mikro dan kecil juga tidak repot dalam hal pembayaran, dikarenakan *bank titil* tersebut yang akan menagih dan menghampiri usaha mikro dan kecil tersebut.

Hal tersebut bertentangan dengan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi bahwa “*Usaha mikro dan kecil hendaknya menghindari dari usaha bank titil atau rentenir tersebut dikarenakan*

*usaha tersebut adalah ilegal dan suatu saat akan merugikan dari usaha mikro dan kecil itu sendiri, bank titil tersebut memang menawarkan berbagai kemudahan – kemudahan dalam memperoleh pinjaman dan modal akan tetapi usaha mikro dan kecil tersebut akan terjerat oleh bunga yang tinggi” (Hasil wawancara Tanggal 30 Januari 2012 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi). Maraknya LKM baik dalam bentuk yayasan maupun dalam bentuk lain yang menjalankan usahanya dalam bentuk simpan pinjam ataupun bank titil / rentenir merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi dalam melakukan pembinaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan menjadi isu strategis dalam upaya pemberdayaan Koperasi UMKM dan Perindustrian di Kabupaten Ngawi. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian lebih menyarankan kepada usaha kecil dan mikro untuk memanfaatkan LKM dalam hal ini Usaha Simpan Pinjam Rukun Tetangga (USP-RT) yang telah diberikan bantuan permodalan oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).*

Pendapat lain disampaikan oleh Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah, Ibu Syela, bahwa *“Kendala yang di hadapi koperasi dan UMKM khususnya usaha mikro dan kecil dalam memperoleh permodalan dan kredit permodalan adalah ketidakmampuan usaha mikro dan kecil dalam menyusun proposal untuk mengajukan kredit atau dana bergulir dari pemerintah atau pengusaha swasta. Tenaga penyuluh lapangan sesuai dengan perannya sebagai fasilitator siap memberikan pelayanan dan bantuan teknis dalam penyusunan*

*proposal. Akan tetapi tenaga penyuluh lapangan dalam menjalankan perannya mempunyai hambatan – hambatan yang berasal dari kalangan usaha mikro dan kecil itu sendiri. Usaha mikro dan kecil sering bersikap kurang koordinatif jika mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari tenaga penyuluh lapangan. Juga sering mendapat penolakan dari usaha mikro dan kecil jika tenaga penyuluh lapangan melakukan pembinaan secara door to door” (Hasil wawancara Tanggal 8 Februari 2012 bertempat di Kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi). Hal tersebutlah yang sejatinya menghambat usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya.*

Dari segi pemasaran, hambatan lebih sering terjadi pada usaha mikro dan kecil hal tersebut dikarenakan pemasaran produk yang mereka hasilkan dan ditawarkan hanya bersifat lokal. Sering terjadi jika ada permintaan yang lebih banyak mereka tidak dapat memenuhinya dikarenakan keterbatasan modal. Hasil temuan di lapangan melalui wawancara dengan pengusaha pembuatan *nata de coco* dari segi pemasaran tidak bisa memenuhi permintaan dalam jumlah besar dari konsumen maupun distributor, dikarenakan peralatan yang tersedia dalam pembuatan *nata de coco* masih tergolong minim. Peralatan yang tersedia hanya dapat menghasilkan produk dalam waktu 5 (lima) hari sekali. Sedangkan dalam waktu – waktu tertentu seperti bulan puasa dan hari raya keagamaan permintaan dari konsumen cenderung meningkat.

Ibu Syela menambahkan, bahwa kurangnya jiwa kewirausahaan juga menghambat pelaku KUMKM dalam menjalankan usahanya terutama di bidang pemasaran. Jiwa kewirausahaan wajib dimiliki oleh setiap pengusaha, sebagai

contoh pengusaha mikro dan kecil yang bergerak dibidang pedagang makanan, mereka harus jeli bagaimana melakukan pengamatan dan mengetahui selera pelanggannya, dengan menyusun menú yang kreatif serta mempunyai ciri khas dari yang diperdagangkan tentunya akan menambahkan nilai yang lebih baik dari segi pemasaran kepada konsumen dan pelanggannya. Sudah menjadi tugas dari tenaga penyuluh lapangan industri kecil dan menengah sebagai motivator yaitu memberikan dorongan dan motivasi kepada para pengusaha agar memiliki motivasi untuk melakukan perubahan terus menerus kearah yang lebih baik dalam meembangkan usahanya. Juga sebagai inovator yang selalu berusaha mengembangkan kreativitas untuk menemukan hal – hal baru baik dalam rangka mengikuti tuntutan perkembangan dunia usaha maupun perkembangan teknologi.

Sejalan dengan apa yang data yang diperoleh pada Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, Tenaga penyuluh lapangan industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Ngawi berpendapat faktor – faktor yang menjadi penghambat pelaku KUMKM dalam menjalankan usahanya adalah :

1. Keterbatasan modal dan penguasaan teknologi yang berdampak pada sulitnya meningkatkan nilai tambah usaha yang dijalankan sehingga pendapatan yang diperoleh relatif rendah;
2. Kualitas kerja yang kurang baik yang berdampak pada lingkungan kerja serta kurangnya inovasi sehingga produk yang dihasilkan berdaya saing rendah;
3. Akses pemasaran yang mempengaruhi peningkatan kapasitas produksi;

4. Faktor individu yang kurang tanggap terhadap bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah;
5. Pola pikir tradisional yang cenderung kurang berpikir kedepan sehingga bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah tidak digunakan secara maksimal untuk pengembangan usaha;
6. Sumber Daya Manusia yang relatif rendah.

Hal sama diutarakan oleh LSM Palapa, bahwa faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan usaha dari KUKM adalah :

1. Kurangnya akses permodalan usaha KUMKM dan kelompok usaha mikro terhadap perbankan.
2. Kurangnya promosi produk – produk KUMKM dan Industri Kecil Menengah.
3. Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan manusia sebagai faktor produksi usaha.

#### **D. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan upaya strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena KUMKM merupakan bagian terbesar dari aktivitas masyarakat. Upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM telah dilakukan dengan langkah-langkah yang nyata, namun hingga sejauh ini masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten

Ngawi mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM tersebut sesuai dengan Visi Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi yakni “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian yang tangguh serta peningkatan produktifitas, daya saing dan kemandirian”. Dalam menjalankan visi tersebut Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi mempunyai Misi, yaitu :

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemberdayaan dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian;
2. Meningkatkan sinergi dan peran aktif masyarakat dalam rangka meningkatkan produktifitas daya saing dan kemandirian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;
3. Mengembangkan iklim usaha dan ekonomi kerakyatan berbasis agraris.

Pencapaian visi dan misi yang optimal tentunya harus disertai dengan program kerja yang nyata, khususnya program kerja yang langsung bersentuhan dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian mempunyai program kerja yang berbasis pada pemberdayaan koperasi dan UMKM diantaranya seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.5

Program dan Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada  
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi Tahun 2011

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM	a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah peserta pelatihan	50 koperasi	100%
		b. Sosialisasi HAKI kepada UMKM	Jumlah peserta sosialisasi	100 koperasi	100 %
2.	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah peserta sosialisasi	48 koperasi	100 %
		b. Pemantaun pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Jumlah UMKM yang dapat menggunakan dana dari pemerintah	16 desa 9 kecamatan	100 %
		c. Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Keikutsertaan KUKM dalam pameran	5 koperasi/ UMKM	100 %
		d. Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Terlaksananya bantuan modal kepada RT	66 desa / 800 RT	100 %
3.	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	a. sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman koperasi	Jumlah peserta sosialisasi	50 koperasi	100 %
		b. monitoring evaluasi dan pelaporan	Termonitor dan terevaluasinya koperasi	90 koperasi	100 %
		c. Pemberdayaan koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi dan UKM yang berkualitas	255 koperasi 400 UKM	100 %
4.	Peningkatan pengembangan industri kecil dan menengah	a. fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM yang terlatih	15 IKM	100 %
		b. fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah stand yang disewa	3 stand	100 %

Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi, Tahun 2011

Empat program Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi mempunyai 11 kegiatan dalam upayanya untuk memberdayakan koperasi dan UMKM.

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif.

Program ini mempunyai dua kegiatan yaitu pelatihan manajemen pengelolaan koperasi atau KUD dan sosialisasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) kepada UMKM. Dari kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi diharapkan semakin bertambahnya jumlah koperasi yang mempunyai manajemen yang tertata dengan baik. Selain semakin banyaknya jumlah koperasi yang berdiri di Kabupaten Ngawi tertatanya manajemen koperasi yang baik merupakan salah satu indikator Kabupaten Ngawi memperoleh penghargaan sebagai kabupaten penggerak koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2009. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa pelatihan ini sangat penting untuk dapat meningkatkan dan menguatkan kelembagaan koperasi agar nantinya semua koperasi di Kabupaten Ngawi bisa menjadi koperasi yang mempunyai standard dalam pengelolaan koperasinya.

Kegiatan sosialisasi HAKI dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada para pelaku industri agar mengetahui dan memahami tentang perlindungan akan hak kekayaan intelektual akan sebuah produk yang mereka hasilkan atau hasil karyanya. Adapun yang termasuk di dalam perlindungan HAKI adalah hak merk, hak cipta, hak paten, rahasia dagang, desain industri dan

desain tata letak sirkuit terpadu. Dalam kegiatan sosialisasi ini Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi lebih menfokuskan kepada para pelaku industri yang bergerak di bidang makanan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini para pelaku industri tersebut dapat mengetahui dan memahami akan kesehatan makanan untuk selanjutnya dapat memperoleh hak akan rahasia dagang.

#### 4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Terdapat empat kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini. Kegiatan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan mempunyai tujuan agar masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha koperasi dan UMKM pada khususnya untuk dapat mengerti tentang berbagai informasi mengenai permodalan yang tersedia dan digelontorkan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten.

Kegiatan pemantauan pengelolaan penggunaan dana dari pemerintah bagi UMKM dilakukan agar dana yang digelontorkan untuk UMKM dapat terpantau dan dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM dilakukan untuk lebih mengenalkan produk yang dihasilkan oleh UMKM kepada masyarakat luas. Dinas terkait memfasilitasi kepada UMKM untuk bisa ikut serta dalam pameran baik itu di tingkat lokal, regional maupun pameran ditingkat nasional.

Kegiatan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal lebih terfokus kepada pemberian bantuan modal kepada Rukun Tetangga

(RT). Pemberian modal ini dimaksudkan untuk menjadikan RT sebagai lembaga keuangan mikro yang mempunyai akses langsung dengan masyarakat. Dengan adanya bantuan modal kepada RT ini diharapkan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses permodalan dan selanjutnya dapat meningkatkan modal usaha serta kesejahteraan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam membangun perkoperasian, penguatan kelembagaan merupakan dasar dari upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan koperasi. Dengan dasar kelembagaan yang kuat akan semakin mempermudah bagi koperasi tersebut untuk melaksanakan dan mengembangkan usahanya. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam program ini yaitu sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian; monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan pemberdayaan koperasi dan UMKM diharapkan dapat membantu perkoperasian di Kabupaten Ngawi untuk lebih berprestasi.

6. Peningkatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Kegiatan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya dilakukan dengan mengadakan pelatihan bagi pelaku industri kecil dan menengah. Pelatihan diberikan untuk lebih meningkatkan kemampuan / *skill* dalam melakukan pekerjaannya. Pelatihan lebih ditekankan kepada penerapan penggunaan teknologi, karena dengan penggunaan teknologi yang tepat diharapkan industri kecil dan menengah dapat lebih meningkatkan produktifitasnya.

Kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta dengan cara melibatkan UMKM dalam kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta.

Program dan kegiatan tersebut diatas dilaksanakan untuk menunjang visi misi Kabupaten Ngawi yang diantaranya adalah meningkatkan kualitas dan produktifitas koperasi dan usaha kecil menengah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian menyatakan bahwa *”Program kegiatan di tahun 2011 ini semua berjalan dengan lancar dan hampir semua terealisasi 100 %, pemerintah daerah melalui dinas koperasi dan umkm yang saya pimpin selalu memberikan program – program yang bertujuan untuk memberdayakan koperasi dan ukm agar lebih mandiri, dinas koperasi juga siap menerima masukan dari pihak manapun agar program kerja yang dimiliki oleh dinas dapat beragam, selalu mempunyai inovasi dan tentunya tepat sasaran. Kami juga membuat klinik koperasi dan umkm yang bertugas untuk menerima segala kritik dan masukan yang bersifat membangun dan kami juga menerima segala bentuk pengaduan yang berkaitan dengan koperasi dan umkm serta kami akan membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di koperasi dan umkm.*” (Hasil wawancara Tanggal 30 januari 2012 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas KUKM dan Perindustrian). Dari kutipan wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa pemerintah daerah mempunyai komitmen yang tinggi untuk memajukan dan meningkatkan kualitas koperasi dan umkm.

Dari pihak LSM juga menyatakan hal yang serupa, hasil wawancara dgn bapak Herry dari LSM Palapa menyatakan bahwa *"kami dari LSM selalu mengawal dan berkoordinasi dengan dinas terkait, khususnya dinas koperasi dalam menyusun program kegiatan selalu berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik itu LSM maupun pihak – pihak yang langsung berkaitan dengan sasaran program kegiatan. Menurut pendapat saya dan teman – teman LSM program kegiatan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, dan menurut pengamatan kami setidaknya sudah tepat sasaran meskipun banyak kekurangan disana sini. Kekurangan tersebut dikarenakan belum meratanya program – program kepada pelaku KUMKM."* (Hasil wawancara tanggal 2 Februari 2012 bertempat di ruang ajudan Bupati Ngawi).

Dampak dari program pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian kepada pelaku UMKM cukup signifikan, hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh tenaga penyuluh lapangan IKM di Kabupaten Ngawi yang juga telah melakukan *kroscek* dilapangan menyatakan bahwa *"program – program pemberdayaan kepada UMKM yang dilakukan oleh dinas membawa dampak yang cukup baik terhadap kemajuan UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang mulai mengerti akan bagaimana menjalankan usahanya dengan manajemen yang baik serta semakin paham bagaimana memanfaatkan modal dengan baik untuk kemajuna usahanya. Pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh dinas juga dirasa sangat membantu dalam menunjang kelangsungan usaha"*. (Hasil wawancara tanggal 8 Februari 2012 bertempat di kantor Dinas KUKM dan Perindustrian).

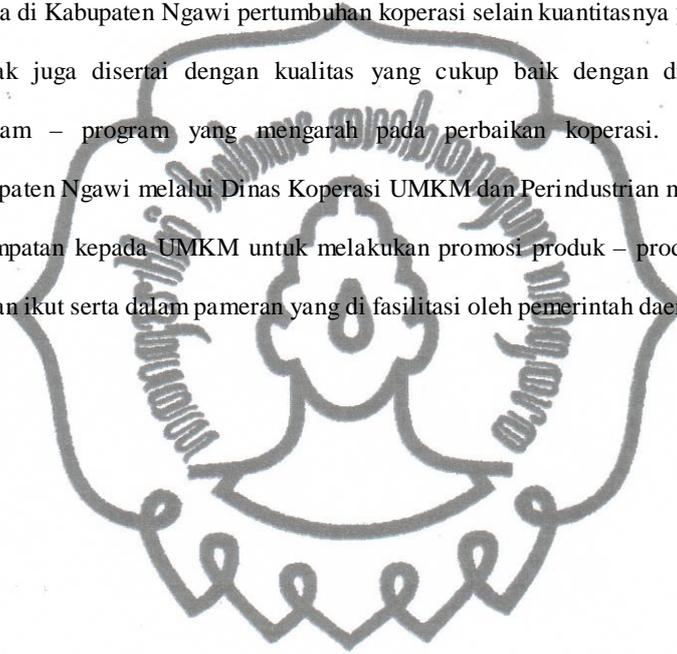
Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Bpk. Sudarno, ketua Pengusaha keripik tempe menyatakan bahwa *”kegiatan yang dilakukan oleh dinas koperasi sedikit banyak membantu, paling tidak kita menjadi semakin bersemangat dalam menjalankan usaha, selin itu juga kita menjadi termotivasi untuk melakukan inovasi – inovasi. Sosialisasi yang diberikan menjadikan para pengusaha keripik tempe menjadi semakin tahu bagaimana berwirausaha yang baik.”* (Hasil wawancara tanggal 5 Februari 2012 bertempat di kediaman bapak Sudarno).

Hasil temuan di lapangan melalui berbagai wawancara yang dilakukan dengan dengan pelaku perkoperasian dan UMKM serta dengan tenaga penyuluh lapangan industri kecil dan menengah bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap industri, kecil dan menengah (IKM) dan koperasi karena pada dasarnya upaya pelatihan maupun pembinaan yang dilakukan adalah demi kemajuan KUMKM sehingga KUMKM dengan kesadarannya mau menerima dan memahami pembinaan yang diberikan untuk kedepannya diterapkan dalam usahanya demi menunjang usahanya. Dan dengan adanya kegiatan tersebut secara otomatis KUMKM sangat terbantu dalam memajukan usahanya.

Adapun presentase pelaksanaan kegiatan tersebut secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik dan diharapkan dari pihak dinas terkait sebagai pelaksana kegiatan untuk kedepannya tetap perlu memprogramkan kegiatan yang serupa, akan tetapi untuk kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan KUMKM agar

diberikan penambahan pelatihan lagi tapi dengan tema yg berbeda untuk menambah ketrampilan dan dapat diikuti oleh seluruh KUMKM.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa hambatan yang dihadapi UKM masih berkuat pada terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan keterbatasan modal. Hal yang berbeda ditunjukkan pada perkembangan koperasi, bahwa di Kabupaten Ngawi pertumbuhan koperasi selain kuantitasnya yang cukup banyak juga disertai dengan kualitas yang cukup baik dengan diadakannya program – program yang mengarah pada perbaikan koperasi. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian memberikan kesempatan kepada UMKM untuk melakukan promosi produk – produk mereka dengan ikut serta dalam pameran yang di fasilitasi oleh pemerintah daerah.



Tabel 4.6

Tabel Hasil Wawancara

No	Nama Responden / Waktu/ Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Kepala Dinas Kukm Dan Perindustrian/ Tanggal 30 Januari 2012 Pukul 09.30 Wib Di Ruang Kerja Kepala Dinas Kukm Dan Perindustrian	<p>Menurut Bapak Bagaimana perkembangan koperasi khususnya koperasi wanitadi Kabupaten Ngawi?</p> <p>Bagaimana penggunaan modal oleh UMKM yang diberikan oleh pemerintah?</p> <p>Bagaimana tanggapan Bapak tentang maraknya <i>bank titil</i>?</p>	<p>Koperasi wanita menjadi idola di Kabupaten Ngawi, Pakde Karwo sangat mengapresiasi keberadaan koperasi wanita yang tumbuh sangat cepat di Kabupaten Ngawi. Setiap desa di tahun 2010 sudah mempunyai minimal satu koperasi wanita padahal jumlah desa mencapai 213 desa. Sasaran koperasi wanita pada awalnya adalah memberdayakan kelompok wanita desa hutan, dimana banyak sekali ibu rumah tangga khususnya yang ada didesa sekitar hutan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan hanya bercocok tanam seadanya. Dengan adanya koperasi ini mereka diberikan keterampilan membuat kerajinan tangan yang dapat menghasilkan uang. Alhamdulillah program tersebut berkembang dan mendapatkan respon yang positif.</p> <p>Itulah yang menjadi masalah klasik dalam hal permodalan UMKM, mereka lebih sering menggunakan bantuan modal yang diperoleh untuk kegiatan konsumtif yang tidak ada sangkut – pautnya dengan usaha yang mereka jalankan. Mereka cenderung tidak memiliki modal cadangan untuk menghadapi situasi yang terjadi secara tiba – tiba</p> <p>Usaha mikro dan kecil hendaknya menghindari dari usaha bank titil atau rentenir tersebut dikarenakan usaha tersebut adalah ilegal dan suatu saat akan merugikan dari usaha mikro dan kecil itu sendiri, bank titil tersebut memang menawarkan berbagai kemudahan – kemudahan dalam memperoleh pinjaman dan modal akan tetapi usaha mikro dan kecil tersebut akan terjerat oleh bunga yang tinggi.</p>

	<p>2. Bpk Hery (Lsm Palapa) Tanggal 2 Februari 2012 Pukul 10.00 Wib Di Ruang Ajudan Bupati Ngawi</p>	<p>Bagaimana program kegiatan yang dilakukan oleh dinas?</p> <p>Bagaimana perkembangan koperasi di Kabupaten Ngawi menurut Bapak, khususnya Koperasi Wanita?</p> <p>Bagaimana anda melihat program kegiatan yang dilakukan oleh dinas koperasi?</p>	<p>Program kegiatan di tahun 2011 ini semua berjalan dengan lancar dan hampir semua terealisasi 100 %, pemerintah daerah melalui dinas koperasi dan umkm yang saya pimpin selalu memberikan program – program yang bertujuan untuk memberdayakan koperasi dan ukm agar lebih mandiri, dinas koperasi juga siap menerima masukan dari pihak manapun agar program kerja yang dimiliki oleh dinas dapat beragam, selalu mempunyai inovasi dan tentunya tepat sasaran. Kami juga membuat klinik koperasi dan umkm yang bertugas untuk menerima segala kritik dan masukan yang bersifat membangun dan kami juga menerima segala bentuk pengaduan yang berkaitan dengan koperasi dan umkm serta kami akan membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di koperasi dan umkm.</p> <p>Perkoperasian di Kabupaten Ngawi mengalami perkembangan yang membanggakan, terutama perkembangan koperasi wanita, koperasi wanita merupakan tonggak keberhasilan Kabupaten Ngawi dalam upayanya untuk memajukan dan memasyarakatkan koperasi. Pemerintah Daerah tidak hanya menjadikan kuantitas saja sebagai tolok ukur keberhasilan, akan tetapi juga mengutamakan kualitas.</p> <p>kami dari LSM selalu mengawal dan berkoordinasi dengan dinas terkait, khususnya dinas koperasi dalam menyusun program kegiatan selalu berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik itu LSM maupun pihak – pihak yang langsung berkaitan dengan sasaran program kegiatan. Menurut pendapat saya dan teman – teman LSM program kegiatan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, dan menurut pengamatan kami setidaknya sudah tepat sasaran meskipun banyak kekurangan disana sini. Kekurangan tersebut dikarenakan belum meratanya program – program</p>
--	--	---	---

3.	Bpk Samidi (Kud Teguhan Paron) Tanggal 3 Februari 2012 Pukul 09.00 Wib Di Kud Teguhan Paron	Bagaimana perkembangan koperasi di Kabupaten Ngawi menurut Bapak?	kepada pelaku KUMKM.  Perkembangan koperasi di Kabupaten Ngawi jika dikatakan berkembang pesat merupakan hal yang wajar, hal tersebut dikarenakan masyarakat Kabupaten Ngawi di dominasi oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh tani, dan juga bekerja di sektor jasa dan usaha mikro kecil. Tentu saja faktor kebutuhan masyarakat akan koperasilah yang menjadikan koperasi di Kabupaten Ngawi tumbuh dengan subur. Dan juga perkembangan yang pesat tersebut mendapatkan tempat dan perhatian di tingkat pemerintah daerah, sehingga ada keyakinan dan motivasi dari pemilik koperasi dan anggotanya untuk terus memajukan dan membesarkan koperasinya
4.	Bpk Sudarno Tanggal 5 Februari 2012 Pukul 11.00 Wib Di Kediaman Bpk Sudarno	Bagaimana Perkembangan Industri Keripik Tempe yang anda geluti selama ini?	Industri keripik tempe merupakan salah satu industri kecil yang sangat bergairah di Kabupaten Ngawi, hal tersebut dikarenakan keripik tempe menjadi ikon dari Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi terkenal akan kripik tempenya yang mempunyai ciri khas tersendiri. Pemasaran keripik tempe pun sudah sampai ke luar kabupaten bahkan di luar Provinsi Jawa Timur
		Bagaimana bapak menilai program kegiatan yang dilakukan oleh dinas koperasi?	kegiatan yang dilakukan oleh dinas koperasi sedikit banyak membantu, paling tidak kita menjadi semakin bersemangat dalam menjalankan usaha, selain itu juga kita menjadi termotivasi untuk melakukan inovasi – inovasi. Sosialisasi yang diberikan menjadikan para pengusaha keripik tempe menjadi semakin tahu bagaimana berwirausaha yang baik.
5.	Ibu Syela Tanggal 8 Februari 2012 Pukul 09.00 Wib Di Kantor Dinas Kukm	Bagaimana perkembangan UMKM di Kabupaten ngawi menurut anda, khususnya industri	Industri Keripik Tempe harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah, pemerintah daerah harus bertanggung jawab terhadap maju mundur dan berkembangnya industri keripik tempe.

	<p>Dan Perindustrian</p>	<p>keripik tempe?</p> <p>Bagaimana anda mengamati pola usaha yang dijalankan oleh kelompok usaha mikro?</p> <p>Hambatan apa yang menurut anda sering dialami oleh UMKM dalam menjalankan usahanya, terutama tentang permodalan?</p> <p>Menurut pendapat anda apakah sudah tepat program – program pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas koperasi? dan bagaimana dampaknya bagi para</p>	<p>Hal tersebut dikarenakan keripik tempe yang sudah menjadi ikon dan ciri khas dari kabupaten Ngawi akan tersaingi oleh industri – industri lain yang sejenis dari luar Kabupaten Ngawi</p> <p>Mereka masih mempunyai pola pikir tradisional dan konsumtif dimana usaha yang mereka jalankan dan hasil dari pendapatannya hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup pada hari itu. Mereka tidak berpikir bagaimana bisa mengembangkan usahanya agar lebih besar lagi. Ini merupakan ciri khas dari usaha mikro yang berjumlah cukup banyak</p> <p>Kendala yang di hadapi koperasi dan UMKM khususnya usaha mikro dan kecil dalam memperoleh permodalan dan kredit permodalan adalah ketidakmampuan usaha mikro dan kecil dalam menyusun proposal untuk mengajukan kredit atau dana bergulir dari pemerintah atau pengusaha swasta. Tenaga penyuluh lapangan sesuai dengan perannya sebagai fasilitator siap memberikan pelayanan dan bantuan teknis dalam penyusunan proposal. Akan tetapi tenaga penyuluh lapangan dalam menjalankan perannya mempunyai hambatan – hambatan yang beasal dari kalangan usaha mikro dan kecil itu sendiri. Usaha mikro dan kecil sering bersikap kurang koordinatif jika mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari tenaga penyuluh lapangan. Juga sering mendapat penolakan dari usaha mikro dan kecil jika tenaga penyuluh lapangan melakukan pembinaan secara door to door</p> <p>program – program pemberdayaan kepada UMKM yang dilakukan oleh dinas membawa dampak yang cukup baik terhadap kemajuan UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang mulai mengerti akan bagaimana menjalankan usahanya dengan</p>
--	--------------------------	--	---

		pelaku usaha?	manajemen yang baik serta semakin paham bagaimana memanfaatkan modal dengan baik untuk kemajuna usahanya. Pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh dinas juga dirasa sangat membantu dalam menunjang kelangsungan usaha
6.	Ibu Siwi Tanggal 9 Februari 2012 Pukul 16.30 Wib Di Kediaman Ibu Siwi	Menurut pendapat anda bagaimana perkembangan industri batik di Ngawi? seperti yang anda geluti sekarang?	Perkembangan industri batik tulis Ngawi mengalami titik perkembangan yang menggembirakan, pemerintah daerah membuka kesempatan dan jalan yang seluas – luasnya kepada pengrajin batik tulis untuk mengembangkan industrinya, seperti diketahui sebelumnya bahwa industri batik tulis Ngawi mengalami masa yang suram dikarenakan batik tulis Ngawi masih kalah bersaing dengan batik – batik dari Solo, Jogjakarta dan Pekalongan. Akan tetapi dengan adanya program pemerintah ini industri batik tulis di Kabupaten Ngawi semakin berkembang dan mulai dicintai oleh masyarakat
7.	Bpk Suluh Tanggal 8 Februari 2012 Pukul 13.30 Wib Di Kantor Dinas Kukm Dan Perindustrian	Bagaimana perkembangan industri anyaman tlas plastik di Ngawi?	Industri anyaman tas plastik menjadi trend dikalangan masyarakat Ngawi, kapasitas produksi selama tahun 2011 tercatat mencapai 1.640.310 buah. Masyarakat lokal mendominasi permintaan dari kerajinan tas plastik tersebut. Sebagian besar pekerja memang berasal dari kaum wanita terutama ibu – ibu rumah tangga yang tidak mempunyai kegiatan sehari – harinya, sehingga melalui koperasi wanita dan bantuan dari LSM Palapa pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian melakukan pembinaan dengan mengadakan pelatihan – pelatihan cara pembuatan kerajinan anyaman tas plastik. Dengan tujuan agar semakin produktif dan dapat menunjang perekonomian keluarga.
8.	Bapak Handoko Tanggal 9 Februari 2012 Pukul 10.00 WIB Di Kediaman Bpk	Bagaimana anda membantu program pemerintah melalui usaha anda?	Untuk meningkatkan produksi serta perekonomian masyarakat, saya mengajak kaum ibu – ibu yang ada di desa untuk ikut serta dalam proses produksi pembuatan anyaman tas plastik. Mereka diberi bekal

	Handoko.		pengetahuan dan ketrampilan cara membuat anyaman tas plastik sampai benar – benar mahir dan bisa menghasilkan anyaman tas plastik sesuai standar. Hasil dari setiap kerajinan yang mereka hasilkan akan saya berikan imbalan yang sesuai
--	----------	--	--

*Sumber : Berbagai hasil wawancara dengan responden, 2012*

Implikasi manajerial yang dapat dilihat adalah bahwa hambatan yang dihadapi UKM masih berkuat pada terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan keterbatasan modal. Hal yang berbeda ditunjukkan pada perkembangan koperasi, bahwa di Kabupaten Ngawi pertumbuhan koperasi selain kuantitasnya yang cukup banyak juga disertai dengan kualitas yang cukup baik dengan diadakannya program – program yang mengarah pada perbaikan koperasi. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian memberikan kesempatan kepada UMKM untuk melakukan promosi produk – produk mereka dengan ikut serta dalam pameran yang di fasilitasi oleh pemerintah daerah.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

**A. Kesimpulan**

1. Koperasi dan UMKM di Kabupaten Ngawi mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Ngawi. Perkembangan koperasi dan UMKM juga dapat dilihat dari prestasi – prestasi yang diraih, tercatat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Kabupaten Ngawi memperoleh beberapa penghargaan di bidang perkoperasian dan UMKM yang cukup membanggakan.
2. Perkembangan koperasi dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi adalah besarnya jumlah anggota, manajemen yang tangguh, besarnya modal serta besarnya volume usaha. Sedangkan faktor eksternalnya adalah iklim usaha yang kondusif dan tingkat kepercayaan masyarakat.
3. Perkembangan UMKM juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi adalah modal, tenaga kerja, teknologi peralatan, inovasi, manajemen usaha serta pemasaran. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah peran

pemerintah daerah, ketersediaan bahan baku, kondisi ekonomi dan stabilitas keamanan.

4. Perkembangan koperasi dan UMKM yang cukup pesat tentunya tidak lepas dari hambatan – hambatan yang di alami oleh pelaku perkoperasian dan UMKM dalam melaksanakan usahanya diantaranya adalah keterbatasan modal, kurangnya pemanfaatan tenaga penyuluh lapangan, terbatasnya akses pemasaran, pola pikir yang cenderung tradisional dan kurang berpikir kedepan sehingga bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah tidak digunakan secara maksimal untuk pengembangan usaha akan tetapi lebih digunakan untuk kepentingan konsumtif, ketergantungan industri kecil dan mikro terhadap jasa *bank tiitil* yang memberikan kredit dengan bunga tinggi.
5. Upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian mempunyai tujuan untuk mengatasi hambatan – hambatan yang dialami oleh koperasi dan UMKM. Pemberdayaan tersebut diaplikasikan kedalam bentuk program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan koperasi dan UMKM tersebut.

Skema pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

Program Pemberdayaan → Kegiatan → Capaian

- a. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM dengan kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD, sosialisasi HAKI kepada UMKM telah tercapai dengan baik.
- b. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan kegiatan Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM, penyelenggaraan promosi produk UMKM, pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal telah tercapai dengan baik.
- c. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan kegiatan sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman koperasi, monitoring evaluasi dan pelaporan, pemberdayaan koperasi dan UMKM telah tercapai dengan baik.
- d. Program Peningkatan pengembangan industri kecil dan menengah dengan kegiatan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta telah tercapai dengan baik.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penmulis dapat memberikan saran khususnya kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih memfasilitasi koperasi dan UMKM dalam upayanya untuk memperoleh kredit permodalan;
2. Pemerintah daerah untuk lebih memperbanyak petugas penyuluh lapangan industri kecil dan menengah, dikarenakan sangat membantu UMKM dalam menjalankan usahanya;
3. Diharapkan untuk lebih memperbanyak program pelatihan yang menunjang keterampilan UMKM dengan tema yang beragam;
4. Mengikutsertakan koperasi dan UMKM dalam pameran yang bertaraf nasional untuk lebih mengenalkan produk – produk UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

▪ **Buku – buku**

- Arikunto, Suharsimi, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Echols, M dan Hassan Shadily, 1996, **Kamus Inggris – Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hikmat, R. Harry, 2006, **Strategi Pemberdayaan Masyarakat**, Humaniora Utama, Bandung.
- Kountur, Ronny, 2005, **Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis**, PPM, Jakarta.
- Moleong, J, Lexy, 2002, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 2005, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nazir, M, 2005, **Metode Penelitian**, Ghalia, Jakarta
- Roesmidi, dan Risyanti, Riza, 2006, **Pemberdayaan Masyarakat**, Alqaprint, Jatinangor.
- Sitio, Arifin dan Tamba, Halomoan. 2001, **Koperasi: Teori dan Praktek**. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Stewart, Aillen Mitchell, 1998, **Empowering People**, Kanisius, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2006, **Metode Penelitian Administrasi**, Alfabeta, Bandung.

▪ **Jurnal**

- Brata, Aloysius Gunadi, 2003, **Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi**, Artikel Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Darmawan, Didik, 2011, **Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keuntungan Industri Keripik Tempe di Kabupaten Ngawi**, Tesis Program Pascasarjana, Fakultas Ekonomi Uiversitas Negeri Sebelas Maret, Solo. 61 Halaman.
- Muchtar, 2007, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Distrik, **Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial** Vol. 12 No. 02 Mei – Agustus 2007.
- Primiana, Ina, 2007, Optimalisasi Sinergitas Pemberdayaan UKM Kasus Kota Bandung, **Jurnal Trikonomika** Vol. 6 Nomor 1, Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Juni 2007.
- Saefuloh, Asep Ahmad, 2008, **Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Di Provinsi Bali dan Sumatera Utara)**, Makalah ini merupakan ringkasan dari laporan penelitian tentang Pengembangan UKM di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Sutrisno, Edy, 2010, Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Usaha Kecil Melalui Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PPWTAD), **Jurnal Litbang Cakrawala**, Vol. 5 No. 1 Desember 2010 : 15 – 28.

Suarja, Wayan, 2007, **Kebijakan Pemberdayaan UKM dan Koperasi Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan**, Makalah disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis Pengembangan UMKM dalam rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang diadakan oleh LPPM IPB-Bogor, 7 dan 8 Nopember 2007.

▪ **Peraturan Perundang – undangan**

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Instruksi Presiden Nomor10 tahun 1998 Tentang Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 Tanggal 29 Januari 2003 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil

▪ **Lain – lain**

<http://www.bps.go.id/> Pertumbuhan PDRB Riil, 1996 - 1998 (%)

[www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)

<http://www.Koperindo.com>

Harian Pikiran Rakyat : 2006